



# Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Kawasan Ditinjau dari Perspektif Kebijakan dan Implementasi

## PENDAHULUAN

Adanya Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) dilatarbelakangi oleh perkembangan proses integrasi ekonomi regional yang dimulai dengan *Trade Preference Arrangement* (TPA), *Free Trade Area* (FTA), *Customs Union* (CU), *Common Market*, *Economic Union* hingga *Monetary Union*. Forum KESR itu sendiri mempunyai pengertian sebagai forum kerjasama ekonomi yang mencakup daerah geografis berdekatan yang melintasi batas dua, tiga, atau lebih negara. Awalnya forum KESR didasarkan atas pengalaman negara-negara tentang permasalahan di masing-masing negara yang mempunyai dampak terhadap negara lain di sekitarnya. Bagi Indonesia, sangat penting melakukan koordinasi melalui forum KESR, karena forum ini bertujuan menciptakan perdagangan sebagai strategi kunci dari pemerintah untuk membangun sosial dan ekonomi wilayah yang kurang berkembang, terpencil, dan di perbatasan melalui pengembangan zona investasi yang berorientasi dan terintegrasi ke pasar regional dan internasional. Sebagai contoh, upaya Indonesia untuk menyelesaikan dampak penyakit menular di Sarawak dan Kalimantan Barat berkembang menjadi upaya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah kesenjangan perekonomian antara Indonesia dengan berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Australia. Contoh lainnya adalah pengentasan masalah gejolak sosial dan penyelundupan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste yang harus diselesaikan melalui koordinasi dan kerjasama antarnegara.

Forum KESR juga dikembangkan sebagai bentuk antisipasi terhadap pengaruh globalisasi yang semakin gencar oleh karena pesatnya perkembangan di bidang transportasi, teleko-

munikasi, dan teknologi. Secara spasial, globalisasi mempengaruhi pembangunan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sisi perdagangan dunia, globalisasi merupakan perkembangan dari hasil teknologi, pasar, dan keuangan, yang kemudian menjadi indikator keterkaitan wilayah/daerah dalam konteks jaringan perdagangan ekonomi dunia. KESR mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah sekitar dan menjadi bagian dari pembangunan nasional dan kerjasama ekonomi di lintas batas (perbatasan).

Bagi Indonesia, KESR dalam jangka panjang diharapkan dapat mendorong pengembangan aktifitas ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan sehingga mengubah karakteristik perekonomian wilayah yang pada awalnya hanya mengandalkan sumberdaya alam tanpa pemrosesan lebih lanjut menjadi pemrosesan tingkat tinggi, serta aktivitasnya kegiatan jasa dan perdagangan.

KESR dibangun atas dasar *enlightened self interest* yang bertitik tolak dari pengakuan adanya kepentingan bersama. Dibentuknya kerjasama ekonomi antar negara ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi masing-masing negara untuk mempercepat arus masuk investasi dengan sektor swasta sebagai pendorong utama. Pada tahap selanjutnya, KESR sangat tergantung pada daya tarik kawasan sebagai daerah untuk berinvestasi.

## DASAR HUKUM

Dasar hukum implementasi pengembangan KESR adalah **Keppres 184 Tahun 1998** tentang **Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional**. Tim Koordinasi KESR beranggotakan : (1) Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri seba-

gai Ketua ; (2) Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura; (3) Menteri Pertambangan dan Energi, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT); (4) Menteri Kehutanan dan Perkebunan, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina (BIMP-EAGA); (5) Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT); (6) Menteri Perhubungan, sebagai Anggota merangkap Ketua Sub Tim Koordinasi untuk Wilayah Pertumbuhan Indonesia-Australia; (7) Menteri Keuangan, sebagai Anggota; (8) Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota; (9) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Anggota; (10) Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sebagai Anggota.

**Tim Koordinasi KESR** bertugas : (1) Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi KESR; (2) Melakukan pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan Pemerintah Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan Australia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KESR; (3) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Presiden bagi pengembangan KESR; (4) Melaporkan perkembangan KESR kepada Presiden.

**Sub Tim Koordinasi KESR Wilayah Tertentu** bertugas : (1) Menyusun dan merumuskan kebijakan guna mendorong KESR wilayah tertentu; (2) Melakukan pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan pemerintah yang terlibat dalam KESR wilayah tertentu; (3) Melaporkan perkembangan KESR wilayah tertentu serta saran dan pertimbangan kepada Tim Koordinasi KESR.

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Pelaksana KESR di masing-masing wilayah pertumbuhan dan pengembangan. Sementara itu, dalam rangka menunjang kelancaran tugas di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi membentuk Sekretariat Nasional KESR. Selanjutnya, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program-program sektoral tertentu antar-wilayah-wilayah pertumbuhan dan pengembangan, Menteri yang bertanggung jawab terhadap sektor terkait dapat membentuk Kelompok Kerja.

Pelaksanaan koordinasi KESR di daerah menjadi tanggung jawab Gubernur yang bersangkutan. Dalam melaksanakan koordinasi KESR, Gubernur bertugas : (a) Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan umum di daerahnya; (b) Mendorong kegiatan promosi usaha; (c) Mendorong dunia usaha nasional untuk meningkatkan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha dari negara-negara yang terlibat dalam KESR dan mitra usaha asing lainnya; (d) Meningkatkan kerjasama di bidang investasi, pariwisata, pertambangan dan energi, pertanian, kehutanan dan perkebunan, industri dan perdagangan, perhubungan, infrastruktur, lingkungan hidup, sumber daya manusia, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya di wilayah KESR; (e) Melaporkan perkembangan KESR di daerahnya kepada Ketua Tim Koordinasi.

Gubernur mengikutsertakan : (a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi; (b) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah; (c) Kantor Wilayah Departemen dan Dinas

Provinsi; (d) Kamar Dagang dan Industri Provinsi; dan (e) Perguruan Tinggi.

Seperti yang tercantum dalam Lampiran Keppres 184/1998, adapun susunan Tim Pelaksana Koordinasi KESR di wilayah-wilayah pertumbuhan dan pengembangan dapat dilihat pada Tabel.

**PERMASALAHAN**

Forum KESR diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan untuk mempercepat pemerataan ekonomi di kawasan sub regional, melalui peningkatan arus investasi dan perdagangan dengan memberikan kemudahan bagi investasi, mempertinggi nilai komparatif (secara internasional) produk ekspor, menekan biaya transportasi dan transaksi, serta mengurangi biaya produksi dan distribusi sehingga mencapai nilai ekonomis.

Menurut Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Investasi dan Kemitraan, yang diwawancarai oleh Tim Redaksi Bulletin Kawasan, kesuksesan pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah-

**Tabel Susunan Tim Pelaksanaan KESR di Wilayah Pertumbuhan dan Pengembangan**

Komponen	Wilayah Pertumbuhan dan Pengembangan				
	SITC	IMT-GT	BIMP-EAGA	IMS-GT	AIDA
Ketua	Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya	Menteri Pertambangan dan Energi	Menteri Kehutanan dan Perkebunan	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Menteri Perhubungan
Sekretaris	Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Asisten Menko Perekonomian Bidang Sumberdaya Alam	Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Pengembangan Kelembagaan	Asisten Menko Perekonomian Bidang Peningkatan Ekspor	Asisten Menko Perekonomian Bidang Industri dan Jasa
Anggota	Pejabat dari : - Dep PU - Depdagri - Dep Kehakiman dan : - Gubernur NTB - Gubernur Sumbar - Gubernur Sulut - Gubernur Sulse - Gubernur Jateng - Gubernur DI Yogyakarta	Pejabat dari : - Deperindag - Dep PU - Dephutbun - Depnaker - Deptan - Depkeu - Dephub - Depdagri ; - Dep Kehakiman - Deplu - Kemenneg PPN/Bappenas - Kemenneg Investasi/BKPM - Kemenneg Agraria/BNP - Kemenneg LH/Bapedal dan : - Gubernur DI Aceh - Gubernur Sumut - Gubernur Sumbar - Gubernur Riau	Pejabat dari : - Deperindag - Dep PU - Dep Pertambangan dan Energi - Depnaker - Deptan; - Depkeu - Dephub - Depdagri - Dep Kehakiman; - Deplu - Kemenneg PPN/Bappenas - Kemenneg Investasi/BKPM - Kemenneg Agraria/BNP - Kemenneg LH/Bapedalda dan : - Gubernur Sulut - Gubernur Sulteng - Gubernur Sulse - Gubernur Sultra - Gubernur Kalbar - Gubernur Kaltim - Gubernur Kalsel - Gubernur Kalteng - Gubernur Maluku - Gubernur Irian Jaya	Pejabat dari : - Deparsebud - Dep Pertambangan dan Energi - Dephutbun - Deptan - Dephub - Depnaker - Depnaker - Dep PU - Depdagri - Dep Kehakiman - Dephub - Deplu - Kemenneg PPN/Bappenas - Kemenneg Investasi/BKPM - Kemenneg Agraria/BNP - Kemenneg LH/Bapedalda dan : - Gubernur Sumbar - Gubernur Riau - Gubernur Jambi - Gubernur Bengkulu - Gubernur Sumsel - Gubernur Lampung - Gubernur Kalbar	Pejabat dari : - Deparsebud - Deperindag - Dep Pertambangan dan Energi - Dephutbun - Depnaker - Dep PU - Depdagri - Dep Kehakiman - Dephub - Deplu - Kemenneg PPN/Bappenas - Kemenneg Investasi/BKPM - Kemenneg Agraria/BNP - Kemenneg LH/Bapedalda dan : - Gubernur Sulut - Gubernur Sulteng - Gubernur Sulse - Gubernur Sultra - Gubernur Kalbar - Gubernur Kaltim - Gubernur Kalsel - Gubernur Kalteng - Gubernur Maluku - Gubernur Irian Jaya - Gubernur Bali - Gubernur NTB - Gubernur NTT

Sumber : Lampiran Keppres 184/1998

wilayah pertumbuhan yang terlibat dalam forum KESR sangat tergantung pada peran sektor swasta sebagai pelaku langsung penggerak pertumbuhan ekonomi, dan peran pemerintah khususnya pemerintah daerah sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pendukung dan koordinasi dalam peningkatan investasi sektor swasta, misalnya memberikan dukungan fasilitasi dan regulasi sektor produksi yang meliputi pengembangan investasi, perdagangan, industri, pertanian, pariwisata, serta sektor-sektor pendukung yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia, mobilitas tenaga kerja/buruh, jaringan komunikasi, dan pengembangan sumberdaya energi (bahan bakar, listrik).

Peran sektor swasta yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ternyata belum optimal, karena secara umum kemampuan perekonomian Indonesia untuk menambah produksi sesuai dengan permintaan pasar luar negeri dalam waktu cepat dan dalam jumlah tertentu sangatlah terbatas, dan umumnya kegiatan ekonomi dalam negeri belum dikelola secara modern sehingga produktifitasnya masih rendah.

Dalam RPJMN 2004-2009 daftar permasalahan struktural industri di Indonesia, masih tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri yang berkisar antara 28-30% antara Tahun 1993-2002. Kemudian, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri di Indonesia lebih banyak yang bersifat "industri rakitan". Masalah struktural lainnya adalah rendahnya kualitas SDM industri yang menyebabkan rendahnya produktifitas industri. Selain itu, belum terintegrasinya pelaku usaha skala UKM di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri-industri skala besar, serta kurang sehatnya iklim persaingan usaha karena banyak subsektor industri yang beroperasi dalam kondisi "monopoli dan oligopoli". Beban para pelaku industri makin berat akibat kenaikan tarif dan pajak, kenaikan harga BBM, tarif listrik, telepon, angkutan dan harga bahan baku belakangan ini. Semua masalah tersebut menjadikan iklim usaha yang cende-

rung mengurangi daya saing produk nasional. Pada akhirnya, menyebabkan proses *multiplier effect* tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Permasalahan yang ditemukan oleh daerah-daerah yang terlibat dalam KESR meliputi :

1. Beberapa pengalaman dalam pertemuan internasional, delegasi Indonesia relatif kurang siap dengan program-program dan proyek yang ingin diusulkan. Sering usulan-usulan kegiatan dalam KESR IMT-GT tidak berasal dari Indonesia melainkan dari Malaysia dan Thailand. Tampaknya kedua negara tersebut lebih siap dalam hal ini.
2. Kurangnya koordinasi antar masing-masing anggota delegasi sebelum dan selama pelaksanaan sidang. Dalam pertemuan-pertemuan KESR IMT-GT delegasi Indonesia sering mengalami *miss-communication* dan *miss-understanding* dalam pembahasan berbagai program/proyek yang akan diusulkannya. Hal ini berbeda sekali dengan anggota delegasi dari Malaysia atau Thailand yang selalu terlebih dahulu mengkoordinasikan berbagai program/proyek yang akan diusulkan oleh delegasi mereka. Disamping itu, peran pemerintah pusat atau pemerintah daerah lebih dominan dibandingkan dengan peran sektor swasta terutama UKM, akibatnya swasta enggan terlibat secara aktif dalam KESR IMT-GT.
3. Hambatan komunikasi terutama masalah bahasa dalam pertemuan-pertemuan KESR IMT-GT. Disampaikan oleh wakil Kadin bahwa wakil dari daerah sering mengalami masalah dalam memahami apa yang sesungguhnya dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan KESR. Akibatnya pengiriman delegasi ke pertemuan-pertemuan KESR IMT-GT menjadi tidak optimal karena wakil yang hadir dalam pertemuan tersebut kurang memahami apa substansi yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan tersebut.

4. Masalah fokus terhadap pembangunan wilayah dalam KESR IMT-GT, yang diperluas menjadi 10 provinsi, sehingga fokus pemerintah menjadi berkurang karena banyaknya daerah yang harus ditangani. Seperti Aceh, mempersoalkan mengenai tidak adanya akses keluar dari Provinsi NAD ke wilayah lain di Indonesia atau ke negara lain di luar Indonesia. Saat ini, hanya Medan dan Riau yang memiliki akses ke luar wilayah negara Indonesia. Aceh sebagai pintu masuk di Pulau Sumatera diharapkan juga memiliki akses tersebut dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonominya melalui pengembangan Pelabuhan Calang sebagai salah satu pintu masuk ke Provinsi NAD yang sayangnya hanya sebagai pelabuhan laut dan tidak dikembangkan sebagai pelabuhan penyeberangan dari Aceh dan ke wilayah-wilayah lain di luar Aceh. Meski telah melalui perjalanan panjang dalam kerjasama KESR ini, faktanya Aceh masih tertinggal dari daerah-daerah lain yang juga termasuk dalam KESR IMT-GT.
5. Komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dalam implementasi program/proyek dalam rangka mendukung KESR IMT-GT belum optimal, sehingga daerah belum dapat secara langsung menikmati apa yang diharapkan dari kerjasama IMT-GT. Komitmen dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memprioritaskan pembangunan wilayah perbatasan yang berorientasi pembangunan kesejahteraan disamping keamanan, seperti di wilayah perbatasan Kalimantan dan Papua, belum optimal diupayakan, seperti berikut ini :
  - a) Pendekatan keamanan (*security approach*) yang diterapkan dalam penanganan Kelompok Kerja (Pokja) Sosek Malindo di wilayah Kalimantan dan *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG yang terkait dengan Provinsi Papua,

belum diupayakan saling menunjang dan melengkapi dengan pendekatan pembangunan kesejahteraan sebagai dasar pengembangan kerjasama ekonomi sub-regional seperti BIMP-EAGA.

- b) Penanganan Pokja Sosek Malindo dan JBC RI-PNG selama ini ternyata belum menciptakan suatu keterkaitan/ *'interface'* yang terpadu dengan program pengembangan kawasan KESR BIMP-EAGA, yang sebenarnya sangat relevan untuk dikembangkan secara integratif dan saling mendukung dengan Pokja Sosek Malindo dan JBC RI-PNG. Selama ini, penanganan kerjasama pengembangan Wilayah Perbatasan dengan KESR berada pada instansi kementerian koordinator yang berbeda, walaupun instansi yang terlibat atau terkait di dalamnya relatif sama, maka upaya untuk menerpadukan dan saling melengkapi di antara keduanya masih belum dapat terwujud dan terkesan pengelolaannya masih parsial.
- c) Dengan masih ditemuinya kerancuan dan ketidakterpaduan di atas, maka sangat diperlukan suatu upaya untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasil guna kedua upaya kerjasama yang sifatnya bilateral dan sub regional tersebut, yaitu melalui pendekatan program pengembangan kawasan khusus yang meliputi pengembangan kawasan cepat tumbuh (KESR), kawasan perbatasan antarnegara (Pokja Sosek Malindo dan JBC RI-PNG), dan kawasan andalan prioritas (KAPET).
- d) Belum ada penyusunan suatu *masterplan* yang terpadu dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan tersebut, sehingga beberapa upaya yang telah disepakati di dalam

pengembangan kawasan perbatasan antarnegara, khususnya di Kalimantan dengan Pokja Sosek Malindonya dan di Papua dengan *Joint Border Committee* (JBC) RI-PNG, belum optimal ditangani secara lintas sektoral dan lintas sumber pembiayaan.

**PELUANG PENGEMBANGAN**

Proses inovasi dan difusi teknologi merupakan proses yang penting bagi kemajuan sosial ekonomi. Pada masa globalisasi dan dunia informasi sekarang, kerjasama antar negara-negara atau kawasan dapat dilakukan dengan baik dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya. Informasi mengalir melalui internet, pergerakan manusia, dan komoditas melalui perdagangan bisnis dan masuk-keluarnya modal melalui *foreign direct investment* (FDI). Jika semua peluang itu dikelola dengan baik akan membantu mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas kawasan dalam waktu yang singkat.

Dalam usaha mengembangkan ekonominya, banyak negara berkembang berusaha menaikkan tingkat kemakmuran masyarakatnya melalui pembangunan sektor industri. Malaysia merupakan contoh negara yang dapat melepaskan diri dari struktur ekspor yang hanya terdiri dari beberapa bahan mentah saja, dimana ekspor manufaktur merupakan komponen ekspor yang terpenting. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Indonesia dimana komponen ekspornya masih terdiri dari bahan mentah dan komposisi bahan mentah ini sangat terbatas dan hanya terdiri dari beberapa produk unggulan saja jika dibandingkan dengan potensi produk-produk unggulan yang masih belum terkelola dengan baik.

Untuk itu Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan peluang-peluang dalam peningkatan kerjasama antar negara yang terlibat dalam IMT-GT dan BIMP EAGA antara lain berupa lokasi yang sangat strategis pada posisi perdagangan regional dan internasional, yang jika dikelola dengan optimal akan mampu mendukung perkembangan be-

berapa sektor-sektor utama kerjasama pembangunan IMT-GT yang meliputi infrastruktur, pengembangan SDM, perdagangan, industri dan investasi, pertanian dan perikanan serta pariwisata.

Peluang kerjasama ekonomi regional dengan negara-negara tetangga dalam mengembangkan suatu kawasan sangat terbuka luas, seperti : (a) Kawasan Timur Indonesia bagian utara dengan Filipina bagian selatan dan Malaysia bagian timur, dalam kerangka KESR BIMP-EAGA seperti Provinsi Kalimantan Timur - Kalimantan Barat dengan Malaysia bagian Timur dan Brunei Darussalam; (b) Antara Kawasan Timur Indonesia bagian timur dengan Papua Nugini dan negara-negara di Kepulauan Pasifik, dalam kerangka kerjasama ekonomi regional Arafura; (c) Antara Kawasan Timur Indonesia bagian selatan dengan Australia bagian utara, dalam kerangka kerjasama ekonomi regional AIDA.

Penetapan KAPET Tahun 1996 di beberapa provinsi, jika dikaitkan dengan pemanfaatan forum KESR ini, maka perlu dipertimbangkan keterkaitan pengembangan KAPET tersebut dalam konteks pengembangan KESR tersebut. Masalahnya, bahwa KAPET belum dapat dikembangkan secara optimal, meski memiliki peluang yang terbuka luas dalam KESR karena posisinya yang strategis. Oleh karena itu, ke depan ini rencana pengembangan KAPET yang cukup berpeluang seperti Sanggau di Kalimantan Barat, KAPET SASAMBA di Kalimantan Timur, KAPET Manado-Bitung di Sulawesi Utara, dan KAPET Biak di Papua dapat diarahkan untuk menumbuhkembangkan daya saing dan kompatibilitas dengan wilayah mitra kerjasamanya yang ada di negara tetangga, sepanjang dikelola secara tepat dan optimal.

**IMPLEMENTASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KESR**

Pelaksanaan KESR dalam lingkup ASEAN telah dibangun sejak disepakatinya kerjasama SIJORI (Singapura-Johor-Riau) pada awal tahun 1990 yang lalu menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Pesatnya pertumbuhan kerjasama BIMP-EAGA awalnya hanya melibatkan tiga provinsi di wilayah KTI

(Kalbar, Kaltim, dan Sulut), kemudian diikuti oleh seluruh provinsi di wilayah KTI hanya dalam waktu dua tahun setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama BIMP-EAGA Tahun 1994. Melalui kerjasama yang dilakukan telah banyak kesepakatan yang dicapai yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan operasional melibatkan pemerintah dan swasta dari negara-negara yang terlibat dalam kerjasama. Dalam pertemuan ketiga IMT-GT bertambah enam provinsi baru di Thailand Selatan sehingga IMT-GT beranggotakan 32 negara bagian dan provinsi dari seluruh Sumatera, kecuali dua negara bagian Malaysia dan 14 provinsi di Thailand Selatan. Selain itu, KESR juga dikembangkan dalam bentuk :

- Kerjasama di bidang sosial ekonomi daerah perbatasan Malaysia (Sarawak dan Sabah) dengan Indonesia (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur) yang disebut Sosek Malindo, diketuai oleh *General Border Committee* (GBC) di masing-masing negara. Di Indonesia sendiri diketuai oleh Panglima ABRI dan sejak tahun 2007 dialihkan ke Ditjen Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri. Di bawah GBC telah dibentuk pula Pokja Sosek Malindo di tingkat provinsi/negera yang ditujukan untuk : (a) Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi yang digunakan bersama, (b) Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan, (c) Melaksanakan pertukaran informasi mengenai proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama, dan (d) menyampaikan laporan kepada Pokja Sosek Malindo tingkat pusat mengenai pelaksanaan kerjasama pembangunan sosial ekonomi di daerah perbatasan. Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (SOSEK MALINDO) tersebut selain dikoordinasikan oleh Panglima ABRI selaku ketua GBC Indonesia, juga melibatkan Menteri Luar Negeri masing-masing negara selaku Ketua *Joint Committee Meeting*

(JCM) untuk membicarakan pembicaraan kerjasama bilateral antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah RI.

- Telah dikembangkan kerjasama daerah perbatasan antara Papua-Papua Nugini antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Papua Nugini melalui pembentukan *Joint Border Committee* (JBC) yang di pihak Pemerintah RI diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.
- Selain dari hasil kerjasama dalam bidang sosial ekonomi yang dilandasi oleh latar belakang politis di atas, telah dirintis dan dikembangkan pula beberapa kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, yang antara lain ditunjukkan oleh kerjasama segitiga pertumbuhan IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapore Growth Triangle*) atau yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari kerjasama segitiga pertumbuhan SIJORI.

Hasil perkembangan dalam Tahun 2006, seperti yang terjadi di Provinsi NAD, untuk mendukung pengembangan investasi telah didirikan Kantor Penunjang Investasi "*Investor Outreach Office*" yang berfungsi sebagai Lembaga Pendampingan Investor Standar Internasional pertama di Indonesia yang diprakarsai oleh BRR, BKPM, dan IFC serta didukung oleh Kemitraan Indonesia-Australia (AIPRD). Bidang-bidang yang saat ini tengah dikembangkan Provinsi NAD mencakup bidang perhubungan (transportasi darat, laut, dan udara), sumberdaya air dan air minum, pos, telekomunikasi dan teknologi informasi, selain itu telah diidentifikasi potensi sumberdaya alam Aceh untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi mencakup potensi energi geothermal, potensi energi air, dan potensi energi listrik.

Saat ini Provinsi NAD sangat memerlukan kesepakatan terhadap *draft* Kerangka Acuan Kerjasama Forum Gubernur *Indonesia Growth Triangle* dalam Musrenbangnas 2006 sesuai dengan *the 1st Joint Statement IMT-GT Summit* dan Usulan Rencana Tindak dan program KESR IMT-GT 2006-2007, Pemda dan dunia usaha perlu mengidentifikasi

program, proyek, dan aktifitas sebagai bahan penyusunan *roadmap* IMT-GT, mendorong pelaksanaan "*Trial Ground ASEAN Framework Agreement*" di kawasan Indonesia *Growth Triangle*, melakukan pendekatan/perundingan dengan Malaysia dan Thailand untuk pelaksanaan program/proyek yang sudah berhasil diidentifikasi oleh dunia usaha (JBC). Namun tersendat karena regulasi dan hambatan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh bila ada perubahan *supply*, perubahan *demand*, dan faktor efisiensi. Perubahan *supply* terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas dan kualitas *natural resources*, peningkatan kuantitas dan kualitas *human resources*, penambahan *supply (stock) of capital goods* dan perbaikan teknologi. Riil GDP akan bisa dicapai jika ada kombinasi antara penambahan jumlah lapangan kerja dan waktu kerja serta dukungan dari peningkatan teknologi, kuantitas modal, pendidikan dan pelatihan, serta efisiensi yang dialokasikan.

Adapun strategi pengembangan KESR mencakup : (1) Perubahan pola pikir dengan menetapkan bahwa kemakmuran adalah suatu pilihan yang harus dicapai, (2) Pengembangan investasi dalam bidang SDM, (3) Pengembangan sektor swasta yang mencakup UKM, (4) Kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan besar, (5) Melakukan inovasi dan mengembangkan kewirausahaan, (6) Investasi di bidang infrastruktur, (7) Penciptaan lingkungan yang kondusif bagi investasi, (8) Peningkatan perdagangan melalui konsolidasi pasar lokal dan nasional serta integrasi menuju ekonomi global, (9) Pengelolaan berkelanjutan terhadap SDA dan lingkungan, (10) Pengamanan wilayah dari konflik intranasional, perang antar-negara, terorisme dan kejahatan internasional, dan (11) Penerapan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan *law enforcement*.

#### **PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KESR**

Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan KESR terutama

yang terkait dengan IMT-GT dan BIMP-EAGA, sedangkan IMS-GT relatif kurang berjalan. Telah terlihat perkembangan yang cukup baik, bahwa selain dari keterlibatan beberapa provinsi yang telah masuk dalam KESR sejak dari awalnya, perkembangan terakhir menunjukkan adanya perhatian yang demikian besar dari provinsi-provinsi lainnya yang berdekatan atau berada di wilayah yang sama untuk masuk menjadi bagian dalam kerjasama.

Untuk mendukung pengembangan KESR di KTI, dengan masuknya tujuh provinsi baru di wilayah KTI dalam BIMP-EAGA, menunjukkan bahwa semakin besarnya ketertarikan pemerintah daerah untuk dilibatkan dalam kerjasama tersebut, sehingga diperlukan suatu upaya untuk semakin memantapkan peran dari masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya perlu diikuti dengan upaya pendelegasian berbagai kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tersebut sekaligus mencakup kegiatan pembinaan dan pengendalian kekuatan dunia usaha di masing-masing daerah.

Melalui pengkajian kelayakan yang cermat dan intensif, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan kalangan dunia usaha di daerah, namun selama ini terbentur pada kendala dan batasan regulasi yang kurang kondusif dan menunjang. Perlu dilakukan kajian mendalam tentang regulasi yang mendukung pengembangan sektor-sektor produksi unggulan tertentu yang potensial di masing-masing daerah terkait, terutama terkait dengan deregulasi dalam bidang fiskal dan moneter, kemungkinan penghapusan hambatan non tarif bagi perdagangan lintas batas negara, penyederhanaan prosedur pemeriksaan bea dan cukai, dan pemberian kemudahan prosedural bagi para pelintas batas.

KESR berdasarkan kedekatan geografis merupakan salah satu faktor penting untuk menjalin kerjasama antar negara di suatu subkawasan tertentu. Pemerintah daerah turut aktif dalam berbagai upaya menjalin kerjasama untuk meningkatkan pembangunan eko-

nomi di kawasan yang saling berdekatan, khususnya bagi pengembangan kawasan-kawasan perbatasan di KTI sehingga dapat setara dengan kawasan yang bersebelahan di negara lain.

### **PERANAN SEKTOR SWASTA DALAM Mendukung Pengembangan KESR**

Menurut Teori Schumpeter, sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling efisien untuk menciptakan pembangunan yang cepat, meski teori ini memiliki kelemahan bahwa dalam jangka panjang bisa saja terjadi fluktuasi ekonomi, resesi, bahkan stagnasi dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan sangat ditentukan oleh kemampuan pembentukan modal yang dilakukan oleh pengusaha yang memiliki inisiatif dan inovasi tinggi atau berjiwa *enterprenership* tinggi dalam menciptakan produk-produk yang dibutuhkan pasar.

Peran pelaku usaha telah berjalan dalam menggalang pengembangan kerjasama antar pelaku usaha dengan negara tetangga yang terlibat dalam forum kerjasama ekonomi sub regional. Peran dunia usaha ini akan lebih optimal apabila dapat menangkap peluang pasar yang terbuka luas terhadap berbagai produk dari Indonesia. Sayangnya, dunia usaha Indonesia belum optimal memanfaatkan KESR ini terutama karena belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah produk akhir berbahan baku lokal, sehingga pelaku usaha Indonesia umumnya bergerak dalam pengeksport produk primer atau bahan mentah.

Seyogyanya ke depan, peluang kerjasama KESR ini disamping menguntungkan para pelaku usaha produk primer, namun juga mampu meningkatkan kinerja *multiplier effect* bagi pengembangan perekonomian berbagai lapisan masyarakat Indonesia, melalui peningkatan ekspor produk olahan, yang tentunya harus didukung oleh kebijakan yang memadai.

Peluang pengembangan kegiatan pembaharuan oleh para pengusaha akan mempertinggi pendapatan, masyarakat dan menaikkan tingkat konsumsi. Kenaikan tersebut akan mendorong

perubahan untuk memperbesar tingkat produksinya dan mengadakan penanaman modal yang baru. Hal itu sangat menentukan pihak swasta akan mampu memanfaatkan peluang pengembangan KESR ini. Peran swasta atau pelaku usaha sangat penting sebagai pihak yang langsung memproduksi produk-produk yang dibutuhkan oleh negara-negara yang terlibat dalam kerjasama KESR (seperti produk ekspor ke Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, PNG), baik dalam pembentukan modal kembali, penghasil devisa negara, membuka lapangan kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.

### **PERANAN SEKTOR SWASTA DALAM Mendukung Pengembangan KESR**

Universitas merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi di daerah. Saat ini, sebagai pusat pendidikan, pengetahuan, inovasi, bakat, dan bisnis, universitas diharapkan dapat menyediakan tiga fungsi utama berupa penciptaan peluang kewirausahaan dan semangat untuk melakukan inovasi, perluasan jaringan global, serta penciptaan *platform* untuk pembangunan berkelanjutan. Demi mencapai hal-hal tersebut, universitas dapat melakukan beberapa cara yaitu dengan mengupayakan pembentukan modal secara kreatif, membangkitkan pengetahuan dan teknologi, mendidik SDM, membangun modal sosial, dan melindungi modal SDA. Untuk itu universitas dapat memainkan beberapa peran dalam pertumbuhan ekonomi regional/kawasan yang mencakup peran sebagai *attractor*, *stimulator*, *creator*, *partner*, dan bahkan eksportir. Namun dalam kenyataannya, peran tersebut belum optimal dijalankan oleh perguruan tinggi, karena masih rendahnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk mengembangkan sektor pendidikan, bahkan sejumlah subsidi sudah sangat berkurang untuk mendukung dunia pendidikan, serta masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. (YR)

\*) Diolah dari berbagai sumber

# Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub Regional dalam Perspektif Mendorong Pengembangan Kawasan di Indonesia

Oleh :  
Edi Yusuf \*)



Model kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN, atau biasa disebut kerjasama segitiga pertumbuhan (*growth triangles*) atau wilayah pertumbuhan (*growth area*), dibentuk sebagai reaksi berlakunya rezim perdagangan multilateral GATT-WTO. Dibandingkan kerjasama regional lainnya, skema kerjasama subkawasan ASEAN lebih bersifat *market-driven*, *peripheral-oriented*, dan *private sector-led oriented* berdasarkan prinsip keterbukaan dalam pembangunan wilayah (*open regionalism*), bukan pada pembentukan blok kawasan tertutup (*building block*). Tujuan utamanya yaitu memadukan kekuatan dan potensi wilayah perbatasan di antara negara ASEAN sebelah timur melalui kegiatan perdagangan dan investasi sehingga menjadi wilayah pertumbuhan yang

dinamis, sejalan dengan *Agenda for Greater Economic Integration*.

Kerjasama *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) pada pelaksanaannya menunjukkan perkembangan yang pesat dilihat dari makin meningkatnya interaksi yang dibangun antar daerah yang menjadi anggotanya. Kesuksesan IMS-GT mendorong lahirnya Deklarasi Singapura oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-4 di Singapura, 28 Januari 1992, yang antara lain menegaskan peran penting skema subkawasan dalam kerjasama ekonomi ASEAN secara keseluruhan yang ditegaskan lebih lanjut pada *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation 1992* pasal 4. Pada pertemuan para Menlu ASEAN (AMM)

ke-34 di Hanoi, Juli 2001, telah dikeluarkan komunike bersama yang menegaskan bahwa kerjasama subkawasan ASEAN merupakan landasan kuat bagi pemerataan pembangunan dalam rangka pencapaian integrasi ekonomi ASEAN.

Dari *feasibility study* yang disponsori ADB pada tahun 2004 telah dihasilkan rekomendasi bagi sekitar 150 bidang kerjasama potensial yang dapat dikembangkan melalui skema kerjasama subkawasan ASEAN. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Pendek (1 tahun), Jangka Menengah (2 - 5 tahun), dan Jangka Panjang (5 - 10 tahun). Rekomendasi jangka pendek ditujukan untuk menciptakan iklim kebijakan yang kondusif bagi pengembangan sarana



dan prasarana pendukung investasi. Sementara untuk jangka menengah dan panjang, diarahkan pada penguatan dan pemberdayaan kinerja ekonomi yang mendukung kerjasama di tingkat ASEAN yang lebih luas seperti dalam AFTA dan APEC. Khusus untuk BIMP-EAGA, kajian ADB mengidentifikasi tujuh bidang kerjasama yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; bidang keuangan, investasi dan perdagangan; bidang pariwisata; bidang perhubungan dan komunikasi; bidang pertambangan dan energi; bidang pengembangan SDM; serta bidang pengembangan industri.

**INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND-GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)**

IMT-GT merupakan salah satu bentuk Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) yang keanggotaannya melibatkan tiga negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pembentukan IMT-GT direstusikan melalui penandatanganan *'Agreed Minutes'* pada Pertemuan ke-1 Tingkat Menteri IMT-GT di Langkawi, Malaysia, tanggal 20 Juli 1993.

Di bawah kerjasama IMT-GT, sektor swasta terus didorong menjadi *"engine of growth"*. Untuk tujuan tersebut telah dibentuk suatu wadah bagi para pengusaha di kawasan IMT-GT yang disebut *Joint Business Council (JBC)*. JBC secara aktif ikut dilibatkan dalam rangkaian SOM/MM IMT-GT setiap tahunnya. Dalam perjalanannya, IMT-GT telah menghasilkan capaian yang memiliki kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. Perkembangan paling signifikan yang diraih IMT-GT adalah di bidang pariwisata dan transportasi. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di dalam wilayah IMT-GT, pengoperasian maskapai penerbangan tambahan dan layanan jalur baru penerbangan, pembukaan jalur pelayaran laut Belawan-Pekanbaru-Dumai-Penang, dan

jalur Satun-Langkawi, peningkatan perdagangan lintas batas, peningkatan investasi di sektor pertanian dari Malaysia dan Thailand ke Sumatera, dan pembentukan UNINET, yang mewadahi kerjasama pendidikan, penelitian, dan pertukaran tenaga ahli.

Pada SOM IMT-GT ke-12/MM ke-11 di Pekanbaru, November 2005, telah disepakati untuk meningkatkan kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta melalui pendirian *Coordination Center* dan penyusunan *Roadmap of the Development of the IMT-GT*. Untuk pertama kalinya pada SOM/MM IMT-GT ini telah diselenggarakan *IMT-GT Governors Forum* yang bertujuan meningkatkan dialog antara para kepala daerah sebagai *Facilitator* dan *Regulator* dengan JBC sebagai *engine of growth* pembangunan ekonomi sub kawasan.

Pada SOM ke-13/MM ke-21 IMT-GT, Selangor, Malaysia, 13-14 September 2006, telah dibahas draft *IMT-GT Roadmap for Development* yang disusun ADB. Kepala BKPM selaku Ketua Delegasi RI pada pertemuan ini menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus aktif dalam memfasilitasi dan mendukung program kerja IMT-GT, serta menekankan perlunya koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar negara dalam pelaksanaan program-program yang ditetapkan dalam *Roadmap* tersebut. Pada KTT IMT-GT ke-1 di Kuala Lumpur tanggal 11 Desember 2005 di sela-sela KTT ASEAN, ditegaskan pentingnya peran IMT-GT dalam proses integrasi ekonomi ASEAN, perlunya mempercepat pembangunan ekonomi wilayah perbatasan, dan dalam kaitan itu menyetujui rekomendasi IMT-GT MM ke-11 untuk memperkuat mekanisme kerjasama IMT-GT, meningkatkan perdagangan, investasi dan pariwisata, serta menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi dunia usaha.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut Menteri-Menteri terkait ditugaskan untuk menyusun peta kebijakan

(*roadmap*) bagi pengembangan IMT-GT yang berfokus pada pendekatan pragmatis dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif kerjasama, antara lain melalui penyusunan *data-base* mengenai potensi kerjasama perdagangan, investasi, dan pariwisata di negara-negara anggota. Para pemimpin juga sepakat meningkatkan fasilitasi kerjasama perdagangan serta pergerakan barang, jasa, dan manusia dalam lingkup IMT-GT dengan melibatkan dukungan negara-negara mitra wicara. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri IMT-GT yang diwakili oleh Menko Perekonomian RI, mengusulkan tujuh rekomendasi bagi percepatan pertumbuhan dan implementasi kesepakatan dalam IMT-GT yang meliputi :

- a. Peningkatan daya saing investasi dengan menciptakan kebijakan bersama dalam mendukung sektor swasta.
- b. Penyusunan *roadmap* yang mengintegrasikan sistem, kebijakan dan strategi.
- c. Pembentukan *database* komprehensif mengenai perdagangan, investasi dan pariwisata di kawasan IMT-GT.
- d. Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.
- e. Pengupayaan dukungan partner pembangunan seperti ADB.
- f. Penguatan peranan sektor swasta sebagai *engine of growth* (melalui JBC).
- g. Intensifikasi hubungan antar masyarakat IMT-GT.

Secara khusus Presiden RI mengusulkan sejumlah langkah yang perlu diambil IMT-GT dalam mencapai tujuan, antara lain meningkatkan partisipasi China dan Jepang dalam pembangunan kawasan ASEAN bagian barat, mengidentifikasi potensi kerjasama ekonomi khususnya bidang transportasi dan energi, mengembangkan kerjasama keamanan khususnya penanganan *transnational crime* serta terorisme, serta diseminasi informasi

mengenai potensi ekonomi dengan melibatkan sektor swasta.

Pada Pertemuan SOM/MM IMT-GT ke-14 di Songkhla, Thailand tanggal 4 - 6 September 2007 telah disepakati pembentukan *Centre for IMT-GT Sub Regional Cooperation (CIMT)* di Selangor, Malaysia. Pada KTT IMT-GT ke-2 di Cebu, Filipina, bulan Januari 2007, telah dibahas kemajuan-kemajuan yang dicapai sejak KTT IMT-GT ke-1 di Kuala Lumpur bulan Desember 2005. Pada KTT tersebut telah disahkan "*IMT-GT Roadmap for Development 2007-2011*" yang diarahkan pada kerjasama di bidang keamanan, khususnya isu kejahatan lintas batas, terorisme, dan penanggulangan penyakit menular; memfasilitasi kemajuan subkawasan yang terhambat akibat implementasi proyek-proyek unggulan (*flagship projects*) secara sporadis dan kelelahan koordinasi sektor pemerintah dan swasta; serta meningkatkan mekanisme kerjasama regional dengan merangsang peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif IMT-GT. Dalam *Roadmap* dibentuk koridor-koridor pertumbuhan ekonomi baru yang berfungsi sebagai jalur pertumbuhan, yaitu *Songkhla-Penang-Medan; Strait of Malacca; dan Banda Aceh-Medan-Dumai-Palembang*.

**BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPPINES-EAST ASEAN GROWTH AREA (BIMP-EAGA)**

BIMP-EAGA dibentuk pada *The 1<sup>st</sup> BIMP-EAGA Senior Officials and Ministerial Meeting (SOMM)* di Davao City, Filipina, tanggal 26 Maret 1994 dengan tujuan mendukung pembentukan AFTA dengan memanfaatkan formulasi CEPT dalam kerjasama perdagangan antar negara anggotanya. Keanggotaan BIMP-EAGA saat ini meliputi Brunei

Darussalam; Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua di Indonesia; Sabah, Sarawak, dan Labuan di Malaysia, serta Provinsi Mindanao dan Palawan di Filipina.

Kerjasama BIMP-EAGA memiliki karakteristik-karakteristik *market driven*, penekanan kepada peran sektor swasta, struktur organisasi desentralistik, tanpa sekretariat pusat, dan tidak diperlukan konsensus empat pihak. Cakupan kerjasama BIMP-EAGA dikelompokkan dalam empat *clusters*, masing-masing di



bidang *Transport & Infrastructure* (dike-tuai Brunei Darussalam, membawahi kerjasama perhubungan udara, perhubungan laut, telekomunikasi dan ICT, dan *construction materials*); *Joint Tourism Development* (dike-tuai Malaysia, membawahi kerjasama pariwisata); dan *SME Development and Financial Services* (dike-tuai Filipina, membawahi kerjasama pembangunan UKM dan Jasa Keuangan).

Di bidang perhubungan udara, pada bulan Maret 2005 telah disepakati untuk mewujudkan ide BEBC tentang pembentukan *BIMP-EAGA Air Linkages* yang menerapkan '*open-sky policy*' yang progresif untuk menunjang pengem-

banan sektor pariwisata, perdagangan dan investasi di kawasan. Untuk tujuan ini BEBC telah mengusulkan untuk membentuk aliansi jasa angkutan udara regional yang bernama "*BIMP-EAGA Air Alliance Incorporation*" (*BEAA*) untuk melayani perhubungan udara di kawasan BIMP-EAGA. BEAA akan menjalankan fungsi umum operator penerbangan, termasuk *reservations, charters, code sharing, dan aircraft interchange programmes*. BEAA diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi operasional BEBC yang hingga kini masih sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah.

Aktifitas *cross-border air services* BEAA akan dilaku-kan secara terintegrasi dengan promosi pariwisata dan perdagangan dengan dukungan pendanaan ADB. Untuk tahap awal, BEAA akan merupakan gabungan dari sejumlah operator penerbangan kecil (*low capacity aircrafts*). Struktur permodalan BEAA diusulkan 20% *BEBC*, 40 % investor dari perusahaan jasa pariwisata, dan 40 % dari operator penerbangan dari masing-masing negara anggota dengan sistem *franchise*.

BEAA akan menggunakan sistem operasional yang berlaku secara internasional.

Untuk memperluas cakupan kerjasama BIMP-EAGA, telah dilakukan kerjasama BIMP-EAGA dengan Provinsi *Northern Territory* di Australia. Pada *BIMP-EAGA-Northern Territory Dialogue* di Darwin, tanggal 22 - 25 Mei 2006 telah dibahas berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan BIMP-EAGA untuk meningkatkan *free flow of trade* antar kedua daerah. *Side-by-side* dengan pertemuan tersebut diadakan *BIMP-EAGA Business & Investment Seminar*, dimana dibahas mengenai *Australia's current import regime* dan peluang

investasi di kawasan BIMP-EAGA yang dapat dimanfaatkan investor Australia.

Kerjasama BIMP EAGA dengan China juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada *BIMP-EAGA – China Dialogue* di Brunei Darussalam, Oktober 2006, telah dilakukan pengukuran status China sebagai *Development Partner* BIMP-EAGA. Dalam kaitan ini telah disahkan draft *BIMP EAGA – China Framework of Cooperation* yang disusun berdasarkan *Framework Agreement of the ASEAN – China Comprehensive Economic Cooperation* yang ditandatangani bulan November 2002.

Mengenai kerjasama BIMP-EAGA dengan Jepang, pada *BIMP-EAGA Investment Promotion Seminar (IPS)* yang diselenggarakan *ASEAN–Japan Centre (AJC)* di Tokyo, 22 November 2005, telah disepakati proyek baru yang didanai AJC berjudul "*Promotion of BIMP-EAGA as a Single Destination*" untuk pengembangan sumber-sumber wisata alam dan budaya di wilayah BIMP-EAGA. Pada kesempatan tersebut juga telah ditandatangani kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama antara BIMP-EAGA dengan *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)* dan *Japan External Trade Organization (JETRO)*. Dalam kaitan ini BIMP-EAGA menyetujui akan melakukan peninjauan dengan Sekretariat ASEAN untuk mengukuhkan Jepang sebagai *BIMP-EAGA Development Partner*.

Beberapa langkah maju yang dicapai pasca Pertemuan Bali 2003 antara lain, pembentukan *BIMP-Facilitation Center* sebagai sekretariat BIMP-EAGA di Kota Kinabalu, serta pembentukan Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub-Regional di masing-masing negara anggota. Kunjungan misi China dan Jepang ke wilayah BIMP-EAGA, termasuk ke Indonesia pada tahun 2004 dinilai telah memberikan peluang bagi pengembangan kerjasama perdagangan dan investasi.

Aktualisasi peran BIMP-EAGA dalam kerjasama ASEAN semakin penting

dengan diselenggarakannya *BIMP-EAGA Mini Summit* pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, November 2004. Pada pertemuan SOM ke-12 dan MM ke-9 BIMP-EAGA di Balikpapan, 24-26 November 2004, telah ditandatangani dokumen berjudul "*Evaluation and Assessment of the First Decade of the BIMP-EAGA: Way Forward*". Dokumen ini merupakan pernyataan bersama mengenai komitmen, inisiatif dan masa depan kerjasama BIMP-EAGA di bidang ekonomi melalui sejumlah rencana aksi untuk memberdayakan sektor UKM dalam perdagangan, pariwisata, dan investasi, serta pengaturan partisipasi negara-negara ASEAN lainnya dalam kegiatan BIMP-EAGA, khususnya dalam harmonisasi prosedur bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (CIQS) bersama.

Pada KTT BIMP-EAGA ke-2 di Kuala Lumpur, Desember 2005, telah disahkan "*BIMP-EAGA Roadmap to Development and Action Plan 2006 – 2010*" yang memuat identifikasi proyek-proyek prioritas dan jangka waktu pelaksanaan (*timeframes*) masing-masing, proses pendanaan proyek oleh lembaga-lembaga kerjasama internasional, proses pengesahan proposal proyek, sistem pengawasan dan evaluasi, serta mekanisme program dukungan dan fasilitasi pasca-implementasi. Dalam hal ini Indonesia secara khusus meminta Sekretariat BIMP-FC dan *BIMP-EAGA Business Council* (BEBC) memobilisasi peran swasta dalam pelaksanaannya.

*BIMP-EAGA Roadmap for Development 2006 – 2010* ditetapkan dengan tujuan memberikan arah kerjasama BIMP-EAGA untuk periode lima tahun guna mewujudkan tujuan pembangunannya, khususnya dalam peningkatan perdagangan, investasi dan pariwisata baik antar Negara BIMP maupun dengan negara-negara lainnya. Implementasi *Roadmap* tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, maupun seluruh komunitas di seluruh sub-kawasan.

*Roadmap* BIMP-EAGA juga memuat berbagai program dan rencana kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan EAGA. Secara spesifik, *Roadmap* BIMP-EAGA mencantumkan bahwa tujuan pembangunan BIMP-EAGA adalah untuk mempersempit celah pembangunan antar negara-negara EAGA dan dengan negara ASEAN lainnya. Sasaran jangka pendek BIMP-EAGA adalah untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan pariwisata di dalam EAGA. Secara khusus, *Roadmap* BIMP-EAGA ditujukan untuk :

- a. Meningkatkan perdagangan intra - EAGA sebesar 10% sampai tahun 2010.
- b. Meningkatkan investasi di EAGA sebesar 10% sampai tahun 2010.
- c. Meningkatkan pariwisata di EAGA sebesar 20% sampai tahun 2020.

Di samping itu, BIMP-EAGA juga bekerjasama secara erat dengan ADB, Lembaga Kerjasama Jerman (GTZ) terutama dalam memberikan bantuan teknis dalam rangka *capacity building*. BIMP-EAGA juga pada tahun 2005 secara resmi menerima Northern Territory, Australia, sebagai partner pembangunan.

Pada KTT BIMP-EAGA ke-3 di Cebu, Filipina, 12 Januari 2007, telah disepakati fokus implementasi *BIMP-EAGA Roadmap to Development (2006-2010)* untuk tahun 2007 yaitu peningkatan kegiatan perdagangan, investasi, dan pariwisata antar anggota BIMP-EAGA dan antara BIMP-EAGA dengan negara-negara mitra, peningkatan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya alam, peningkatan koordinasi perencanaan dan implementasi program pendukung infrastruktur, dan penyempurnaan struktur kelembagaan dan mekanisme BIMP-EAGA. Pada kesempatan tersebut Presiden RI menyampaikan kembali dukungan Indonesia bagi pelaksanaan *BIMP-EAGA Roadmap for Development 2006–2010*. Perhatian khusus diberikan bagi kerjasama energi, termasuk *security of*

supply dan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan, serta pengembangan sarana transportasi yang merupakan pendukung utama kegiatan ekonomi di perbatasan. Presiden juga menyatakan bahwa penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi UKM adalah penting bagi pertumbuhan ekonomi makro. Presiden juga menekankan bahwa fasilitasi perdagangan dan lintas batas melalui simplifikasi dan harmonisasi peraturan *custom, immigration, quarantine and security* (CIQS) merupakan suatu hal yang mendesak untuk diaplikasikan. Pada akhir KTT telah ditandatangani *MoU on Expansion of Air Linkages* oleh para Menteri terkait yang pada intinya memberikan fasilitasi yang lebih luas bagi perhubungan udara di kawasan BIMP-EAGA melalui penerapan *the fifth freedom traffic rights*.

**PELUANG DAN TANTANGAN DALAM KERANGKA KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL**

Pelaksanaan inisiatif kerjasama subkawasan ASEAN sering menghadapi kendala akibat kebijakan sektoral yang kurang selaras satu sama lain. Koordinasi dalam pengelolaan kerjasama ekonomi subkawasan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan lembaga pemerintah non-departemen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini kompleksitas struktur pengambil keputusan di pusat dan daerah menyebabkan koordinasi menjadi lemah dan kurang terpadu. Di samping itu juga terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman nasional tentang konsep kerjasama subkawasan, dimana masih terdapat persepsi bahwa manfaat yang diterima tidak seimbang (*unequal benefits*) dengan upaya yang dilakukan.

Rencana perwujudan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di setiap provinsi di KTI sesuai dengan Keppres No. 89 Tahun 1996 perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan pengembangan kerjasama subkawasan ASEAN. Dengan demikian,



penetapan kawasan prioritas KAPET yang akan menjadi tujuan investasi dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja, peranserta, dan produktivitas dunia usaha dalam lingkup kerjasama subkawasan.

Sangat diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan daya dan hasil guna mekanisme kerjasama bilateral dan subkawasan ASEAN, yaitu melalui pendekatan program pengembangan kawasan khusus yang meliputi pengembangan kawasan segitiga pertumbuhan (kerjasama subkawasan ASEAN), kawasan perbatasan antar negara (Pokja Sosek Malindo dan JBC RI - PNG), dan kawasan andalan prioritas (KAPET).

**LANGKAH DALAM KERANGKA KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL**

Untuk mendukung keberhasilan langkah dan strategi yang dirumuskan, diperlukan penyediaan informasi yang terus diperbaharui tentang peluang usaha dan investasi sebagai acuan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk memantau dan menyesuaikan langkah dan strategi, sekaligus untuk menyesuaikan dan mengembangkan kegiatannya secara lebih berdaya guna dan berhasil-guna.

Berbagai forum koordinasi yang diselenggarakan baik antar pemerintah

maupun dunia usaha selama ini cukup optimal dalam penyusunan langkah strategis pengembangannya. Dalam kaitan ini, berbagai kesepakatan yang telah dituangkan dalam MoU di masing-masing subkawasan pertumbuhan ekonomi ASEAN perlu dimanfaatkan secara aktif dan penuh inisiatif oleh dunia usaha, melalui arahan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Seiring dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, KESR diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Diharapkan KESR dapat menunjang kesiapan Daerah dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia, baik dalam rangka AFTA, APEC maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas yang didorong oleh persetujuan perdagangan dunia WTO.

Mekanisme Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) pada mulanya diatur dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres) No. 184 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi dan Sub-Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR). Keppres No. 184 Tahun 1998 dimaksud antara lain menegaskan bahwa Kerjasama Ekonomi Sub

Regional antar daerah daerah/provinsi dengan negara negara bertetangga yang meliputi kerjasama *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT GT), *Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle* (IMS GT), *Brunei-Indonesia-Malaysia-Phillipines East ASEAN Growth Area* (BIMP EAGA) serta *Australia-Indonesia Development Area* (AIDA) perlu terus didorong dan ditingkatkan serta dikoordinasikan lebih efektif dan efisien agar dapat lebih memacu pembangunan ekonomi daerah.

Kemudian pada bulan Februari 2001, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional. Keppres ini dimaksudkan untuk menggantikan Keppres No. 184 Tahun 1998. Keppres No.13 Tahun 2001 pada intinya mempertegas kembali mengenai pentingnya partisipasi daerah dalam Kerjasama Ekonomi Sub Regional khususnya di era otonomi daerah dan sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu untuk memantapkan pengkoordinasian agar KESR dapat dimanfaatkan Indonesia secara lebih efektif dan efisien. Dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan bahwa Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim-Koordinasi KESR.

**PEMANFAATAN KERJASAMA SUBKAWASAN ASEAN BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)**

Seperti diketahui, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN, baik di pusat maupun daerah. Di tingkat daerah telah terlihat perkembangan yang menggembirakan, ditandai dengan meningkatnya minat dan perhatian provinsi - provinsi lainnya yang berdekatan untuk ambil bagian dalam kerjasama ekonomi subkawasan.

Dengan makin besarnya ketertarikan daerah untuk terlibat dalam

kerjasama subkawasan ASEAN, maka diperlukan upaya untuk memantapkan peran daerah yang diikuti dengan delegasian kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian kekuatan dunia usaha masing-masing. Banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah dan dunia usaha daerah, namun terbentur pada kendala dan batasan regulasi yang kurang kondusif. Oleh karena itu sesuai dengan rekomendasi ADB mengenai bidang-bidang potensial yang dapat dikerjasamakan, maka perlu dipertegas arahan deregulasi yang lebih luas untuk mendukung pengembangan sektor produksi unggulan yang potensial di masing-masing daerah.

Pemerintah pusat telah dan sedang melakukan berbagai langkah kebijakan dalam rangka peningkatan kesiapan nasional menjelang pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015, terutama di bidang fiskal dan moneter. Upaya tersebut antara lain di bidang pengurangan dan penghapusan hambatan non tarif (NTB) bagi perdagangan lintas batas, penyederhanaan prosedur pemeriksaan bea dan cukai, serta kemudahan prosedur bagi pelaku perdagangan lintas batas.

Khusus untuk kerjasama BIMP - EAGA, Pemerintah juga telah merancang berbagai kebijakan pemberian fasilitas dan insentif fiskal dan moneter untuk mendukung perwujudan iklim yang kondusif bagi prakarsa dan peran serta investasi swasta, baik dalam bentuk PMA maupun PMDN. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti dan menjabarkan berbagai kebijakan tersebut dalam langkah-langkah operasional dan strategis untuk meningkatkan aktifitas dunia usaha. Peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah menjadi semakin penting dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN di tingkat lokal, baik melalui penyediaan piranti keras investasi berupa prasarana dasar, maupun piranti

lunak investasi berupa iklim yang kondusif.

Dalam kaitan dengan kebijakan dasar pembangunan KTI, terutama dalam memantapkan keterkaitan antara perekonomian daerah dengan kerjasama ekonomi regional dan internasional, maka perlu diciptakan pusat-pusat pertumbuhan di KTI. Untuk itu, arahan penataan ruang yang telah menetapkan pusat-pusat pertumbuhan nasional (*National Development Centers/NDC*) di KTI perlu terus dikembangkan dan direalisasikan. Beberapa pusat pertumbuhan yang dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan dalam kaitan kerjasama subkawasan ASEAN, antara lain: NDC Kupang - Northern Territory dengan memanfaatkan mekanisme kerja sama AIDA (*Australia Indonesia Development Area*); NDC Manado - Davao - Mindanao - Sabah - Serawak dengan pembentukan *Northern Growth Triangle*; dan NDC Pontianak - SIJORI dengan memanfaatkan mekanisme IMS-GT, terutama dalam pengembangan mega proyek Natuna.

Pemantapan kerjasama ekonomi dalam pengembangan KTI bagian utara dengan Filipina selatan dan Malaysia timur di bawah mekanisme BIMP-EAGA, KTI bagian timur dengan Papua Niugini dan negara-negara Pasifik dibawah mekanisme kerjasama ekonomi subkawasan Arafura; KTI bagian selatan dengan Australia utara dibawah mekanisme AIDA; dan Provinsi Kalimantan Timur dan Barat dengan Malaysia Timur dan Brunei Darussalam dibawah kerangka BIMP-EAGA. Mengingat keterbatasan kapasitas KTI, maka perlu dikembangkan sistem informasi pembangunan daerah dan pengembangan wilayah yang akurat, yang didukung dengan kegiatan penelitian dan pengembangan wilayah secara terpadu. (\*\*\*)

\*) Direktur Kerjasama ASEAN  
Ditjen Kerjasama ASEAN  
Departemen Luar Negeri

# Perkembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) dan Peran Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam Membantu Perkembangan KESR

Oleh :

Sofjan Wanandi \*)

## PENDAHULUAN

Apa yang dimaksud dengan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) atau kawasan pertumbuhan? Secara sederhana KESR adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi di beberapa wilayah pertumbuhan (*growth area*) yang memiliki kedekatan lokasi dan komplementaritas sumber daya manusia. Abonyi (1994) menjelaskan bahwa kerjasama kawasan pertumbuhan adalah kerjasama yang menghubungkan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan faktor sumberdaya yang berbeda dan keunggulan komparatif - seperti perbedaan dalam level teknologi, tenaga kerja (kuantitas dan kualitas), sumberdaya alam, dan modal keuangan - untuk membentuk suatu sub kawasan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh dinamika pasar (*driven by market-dynamics*) untuk mendapatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk membuat keterhubungan spesifik lintas-batas lebih dari hanya sekedar komplementaritas dalam masing-masing struktur ekonomi nasional. Kawasan pertumbuhan secara teori merupakan konsep ekonomi, yang didukung oleh motivasi kekuatan politik. Kawasan pertumbuhan berusaha untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan batas-batas peraturan yang ada untuk kepentingan eksploitasi komplementaritas ekonomi dalam rangka memperoleh dampak yang kompetitif untuk meraih investasi lokal dan investasi asing, serta untuk mempromosikan kegiatan ekspor yang saling mengun-

tungkan di wilayah-wilayah dan negara-negara yang terlibat.

Di Asia, khususnya kawasan Asia Tenggara, konsep kerjasama ekonomi regional telah lama di kenal oleh negara-negara di kawasan. Memahami pentingnya kerjasama regional, sejak tahun 1960 ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) telah fungsikan sebagai forum dan alat perencanaan untuk menjalankan kerjasama regional antar negara-negara di kawasan. Lebih lanjut, untuk mendapatkan keuntungan potensial dari perluasan perdagangan intra-regional, saat ini negara-negara ASEAN telah mengambil agenda yang sangat ambisius untuk menggabungkan negara-negara Asia tenggara ke dalam sebuah pasar Asia Tenggara yang terintegrasi secara penuh dengan pembentukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1993 dan mulai secara efektif dilaksanakan pada tahun 2002.

Selanjutnya negara-negara ASEAN bersama dengan negara-negara di Asia lainnya yang mengikuti dalam *East Asia Summit* telah juga berencana untuk mewujudkan sebuah Masyarakat Asia (*Asian Community*), yang terdiri dari *Asian Economic Community*, *Asian Security Community*, dan *Asian Socio-Cultural Community*. Untuk yang pertama, pembentukan *Asian Economic Community* bertujuan untuk menciptakan lalu lintas barang, jasa, modal, dan investasi yang bebas untuk membangun sebuah kawasan asia yang stabil, makmur dan kompetitif, pembangunan ekonomi yang merata, dan mengurangi kemiskinan dan perbedaan kondisi

sosial-ekonomi di kawasan yang coba diwujudkan pada tahun 2015.

Selain itu, negara-negara Asia Tenggara juga melengkapi aktivitas kerjasama ekonomi regional yang lebih umum di atas dengan beberapa inisiatif KESR yang bertujuan untuk memperkuat kondisi ekonomi dan kerjasama ekonomi di wilayah perbatasan dan daerah-daerah tertinggal. KESR ini biasanya mengambil bentuk pembentukan kawasan pertumbuhan yang seringkali dikenal dengan istilah "segitiga pertumbuhan" (*growth triangle*).

Namun, sebenarnya KESR dapat mengambil banyak bentuk. *Pertama*, kerjasama berdasar kedekatan geografik ekonomi (*economic geografic*), yang bisa dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) dan segiempat pertumbuhan (*growth quadrangle*). Segitiga pertumbuhan mencakup IMS-GT (Indonesia, Malaysia, dan Singapore) dan IMT-GT (Indonesia, Malaysia, dan Thailand). Sedangkan segiempat pertumbuhan mencakup *Golden quadrangle* (Yunnan, Laos, Myanmar, dan Thailand) dan BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Philipines). *Kedua*, kerjasama berbasiskan sungai (*River-based Cooperation*) yang mencakup GMS, *Greater Mekong Sub-Regional Economic Cooperation* (Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Yunnan, dan Vietnam); ACMECS, *Ayeyawadi-Chao Phra-Mekong Economic Cooperation Strategy* (Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam); serta MG-EC, *Mekong Ganga Economic Cooperation*, (Mekong Countries dan India). *Ketiga*,

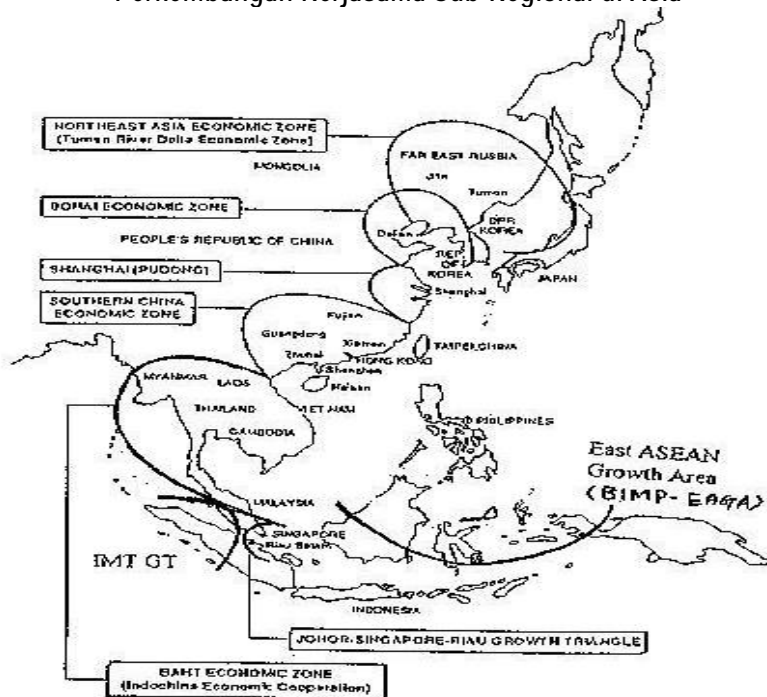
kerjasama lintas sub-regional (*cross sub-regional cooperation*) yang mencakup BIMST-EC, *Bay of Bengal Multi-Sectoral Technological Eco. Cooperation*, (Bangladesh-Bhutan-India-Myanmar-Nepal-Srilanka-Thailand).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abonyi (1994), KESR di Asia Tenggara ini secara umum mengambil bentuk integrasi yang diarahkan oleh investasi (*investment-led integration*), dengan sektor swasta yang menyediakan saluran-saluran modal, teknologi, pelatihan, dan pemasaran. Dalam hal ini, arus intraindustri memainkan peranan kunci (*key role*) sebagai penghubung aktifitas di tingkat perusahaan, seperti investasi, sumber daya, produksi dan distribusi lintas-batas, serta mengambil keuntungan dari komplementaritas ekonomi sub-regional.

Sementara itu pemerintah sebaiknya mengambil peran pendukung yang tidak terlalu jauh. Untuk beberapa kasus, pemerintah dapat bertindak sebagai katalisator. Oleh karena itu, karakteristik penting dari suatu kerjasama ekonomi sub-regional atau kerjasama kawasan pertumbuhan adalah hubungan simbiosis antara sektor publik dengan dengan swasta. Dengan kata lain, segitiga pertumbuhan di fasilitasi oleh pemerintah tetapi dijalankan oleh sektor swasta. Oleh karenanya, secara empirik keberhasilan KESR akan sangat di tentukan oleh komplementaritas ekonomi, kedekatan geografis, komitmen politik, dan pembangunan infrastruktur. Faktor-faktor tersebut merupakan prekondisi terhadap faktor yang paling kritis yaitu komitmen sektor swasta.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas maka tulisan ini bertujuan untuk membahas peran dunia usaha di Indonesia dalam peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional. Pembahasan dalam makalah ini selanjutnya akan diawali dengan diskusi mengenai berbagai kerjasama ekonomi sub-regional di Asia Tenggara dan bagaima-

Perkembangan Kerjasama Sub-Regional di Asia



Sumber: Kakazu et.al. (1994)

mana manfaat, hambatan, dan tantangannya. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan dengan memaparkan peranan apa saja yang telah dan dapat dilakukan oleh dunia usaha untuk meningkatkan kerjasama ekonomi sub-regional ini. Terakhir, pembahasan akan ditutup dengan memberikan kesimpulan dan saran.

**PERKEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI SUB-REGIONAL DI ASIA TENGGARA: MANFAAT, HAMBATAN DAN TANTANGANYA**

Kerjasama Ekonomi Sub Regional mencakup daerah geografis yang berdekatan, yang melintasi batas dua, tiga, atau lebih negara, yang sedang menjalankan proses integrasi ekonomi dan sebagai zona investasi yang berorientasi ke luar, bergeser dari keunggulan komparatif (*comperative advantage*) menuju keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sub-regional dengan tujuan menciptakan perdagangan (*trade creation*).

Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan KESR. *Pertama*, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih cepat dan pendapatan pemerintah serta masyarakat yang lebih tinggi melalui arus masuk investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumberdaya alam dan manusia, serta pengembangan industri bagi kepentingan ekspor melampaui batas-batas negara. *Kedua*, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar kawasan yang berdekatan melalui kerjasama antar negara dengan saling memanfaatkan keunggulan komperatif masing-masing. *Ketiga*, mengembangkan potensi kawasan untuk meningkatkan ekonomi wilayah dan mempercepat upaya pemerataan di kawasan sub-regional melalui pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan investasi serta mendukung kerjasama ekonomi kawasan. *Keempat*, meningkatkan pengelolaan kawasan agar dicapai pengembangan yang efisien, terpadu, serasi dan berkelanjutan. *Kelima*, memberikan kelonggaran

kendala pengadaan dan permintaan dalam negeri melalui perluasan masukan utama, faktor produksi, dan perluasan akses pasar. Kerjasama ini memperluas batas-batas efektif faktor dan proses produksi, produk, dan pasar di luar batas nasional dengan meraih keuntungan kesejahteraan statis (peningkatan produksi dan konsumsi) dan yang dinamis (menuju evolusi struktur ekonomi yang lebih kompetitif).

Di Indonesia, sejak awal tahun 1990-an, KESR telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut diawali dengan pembentukan kerjasama SIJORI (Singapore-Johor-Riau) pada awal tahun 1990. Kerjasama SIJORI tersebut dalam perjalanannya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga selanjutnya diperluas cakupan lokasi dan program kerjasamanya ke wilayah Sumatera bagian tengah dalam bentuk *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) pada tahun 1995. Selanjutnya, pada tahun 1993 dibentuk *Malaysia, Thailand Growth Triangle* (IMT-GT). IMT-GT saat ini terdiri dari delapan provinsi di Thailand Selatan (Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phattalung, Satun, Songkhla, Trang, dan Yala), delapan negara bagian Malaysia (Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis, dan Selangor) serta sepuluh provinsi di kepulauan Sumatera yang mencakup Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.

Setelah tiga belas tahun pertama, IMT-GT ditandai dengan pencapaian penting di berbagai sektor kerjasama. Peningkatan signifikan telah terjadi di bidang perjalanan dan pariwisata, dengan pertumbuhan yang cepat dari jumlah turis di dalam dan dari luar wilayah IMT-GT, pengoperasian maskapai penerbangan yang lebih banyak, peningkatan frekuensi penerbangan ke wilayah IMT-GT, dan peningkatan

jumlah hotel, terutama di Medan, Hat Yai, dan Sadao. Dibandingkan dengan tiga kali penerbangan mingguan antara Penang dan Medan pada awal inisiatif IMT-GT dibuat, saat ini telah ada beberapa maskapai penerbangan yang melakukan beberapa kali penerbangan dalam seminggu tidak hanya antara Medan dan Penang tetapi juga bandara IMT-GT yang lain seperti Pekanbaru dan Palembang di Indonesia.

Faktor kunci yang secara pasti meningkatkan mobilitas manusia di wilayah IMT-GT adalah penghapusan fiskal oleh Pemerintah Indonesia untuk warga negara Indonesia yang berangkat dari wilayah Indonesia yang termasuk kerjasama IMT-GT ke wilayah Malaysia dan Thailand yang juga termasuk dalam kerjasama ini. Hal ini berdampak terhadap peningkatan jumlah pekerja Indonesia di Malaysia dan juga peningkatan jumlah orang Indonesia yang melakukan *medical tourism* dari Sumatera ke Malaysia, terutama di Penang yang menerima hampir 200.000 pengunjung dari Indonesia setiap tahunnya.

Lebih lanjut, selain itu peningkatan mobilitas manusia di wilayah IMT-GT ini juga di dukung oleh ketersediaan transportasi, komunikasi, dan energi yang cukup memadai. Di bidang transportasi laut, empat rute baru telah dibuka untuk memberangkatkan manusia dan barang dari pelabuhan-pelabuhan di Sumatera seperti Belawan, Pekanbaru, dan Dumai ke Penang dan Melaka di Malaysia. Satu rute telah dibuat untuk melayani jalur antara Satun di Thailand Selatan dan Langkawi di Malaysia. Pelayanan kapal Ferry Ro-ro juga telah dimulai untuk melayani jalur Belawan dan Penang. Di bidang transportasi darat, jalan yang menghubungkan Penang dan Songkhla telah diperbaiki, sementara itu Jembatan Trans Malaysia-Thailand telah mulai dibangun melalui kerjasama Petronas dan *Petroleum Authority* di Thailand. Di bidang telekomunikasi, jalur hubungan

kabel fiber optik bawah laut antara Semenanjung Malaysia dan Sumatera telah dibangun melalui kerjasama antara *Telekom Malaysia Bhd.* dan *Telekom Jasmine International of Thailand*. Di bidang energi, kesepakatan pembagian daya listrik dalam wilayah antara Malaysia dan Thailand juga telah termasuk, terutama mencakup *the IPP Power Plant* di Perlis, untuk Malaysia menyediakan energi listrik bagi provinsi-provinsi di Thailand Selatan.

Selain itu, beberapa kemajuan telah juga diraih di bidang perdagangan dan investasi, seperti pembangunan pasar perbatasan, perdagangan barter di dalam wilayah kerjasama. Perpanjangan jam operasi di kota perbatasan Malaysia Bukit Kayu Hitam dan Padang Besar telah membantu dalam meningkatkan perdagangan lintas batas antara Malaysia dan Thailand. Volume perdagangan barter antara Indonesia dan Malaysia juga meningkat secara signifikan. Di bidang investasi, sektor swasta Malaysia telah menanamkan investasi di bidang pertanian komersial di Sumatera, terutama di sektor kelapa sawit dan penanaman pisang. Investasi juga telah dilakukan dalam mengembangkan dan memperluas fasilitas-fasilitas pariwisata terutama resort-resort dan hotel bintang tiga di wilayah IMT-GT.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, IMT-GT juga telah membentuk UNINET (*University Network*), yang merupakan bentuk kerjasama pendidikan, penelitian dan pertukaran antara institusi-institusi pendidikan, penelitian dan pelatihan di wilayah IMT-GT. Program peningkatan SDM seperti pelatihan di bidang jasa keperawatan dan rumah sakit juga telah dilakukan.

Namun demikian, selain berbagai pencapaian yang disebutkan di atas, masih banyak yang harus dilakukan untuk merealisasikan potensi IMT-GT secara penuh. Selain memperluas cakupan geografis, ada pula kebutuhan untuk Pemerintah negara-negara yang



berpartisipasi untuk secara lebih jauh meliberalisasi berbagai kebijakan dan peraturannya yang berdampak pada terciptanya investasi lintas batas dan pergerakan manusia dan barang, menciptakan dan memperkuat lingkungan yang kondusif bagi peningkatan peran serta dan daya saing sektor swasta, serta meningkatkan konektivitas di wilayah-wilayah IMT-GT.

Pada saat yang sama, kerjasama IMT-GT menurunkan akibat krisis keuangan Asia dan kerusakan akibat tsunami 2005, ancaman penyakit SARs dan wabah flu burung, isu-isu keamanan dan tingginya harga minyak dunia. Lebih lanjut, semenjak IMT-GT menjadi lebih global dalam hal sudut pandang dan prinsip ekonominya, IMT-GT akan menghadapi tantangan-tantangan yang sulit dan tidak terelakkan, diantaranya:

1. Bagaimana mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kesempatan yang tersedia akibat meningkatnya globalisasi, integrasi ekonomi ASEAN dan inisiatif menuju integrasi ekonomi yang lebih besar di Asia;
2. Bagaimana untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai suatu wilayah sub-kawasan dalam konteks yang lebih luas dari negosiasi perdagangan multilateral yang terputus-putus, meningkatkan jumlah kesepakatan perdagangan bilateral dan regional, dan kompetisi dengan negara lain, terutama China dan India, dan wilayah pertumbuhan lain di Asia;
3. Bagaimana mempercepat implementasi liberalisasi, simplifikasi, dan harmonisasi langkah-langkah yang mencakup investasi, perdagangan barang dan jasa, dan mobilisasi tenaga kerja, yang dibutuhkan untuk secara penuh mengembangkan komplementaritas ekonomi wilayah IMT-GT, mempromosikan partisipasi sektor swasta yang lebih besar dan memperluas perdagangan dan investasi;

4. Bagaimana memobilisasi sumberdaya untuk membiayai infrastruktur fisik yang dibutuhkan dan dukungan logistik untuk investasi di wilayah IMT-GT; dan
5. Bagaimana mempertahankan momentum kerjasama di wilayah IMT-GT dalam menghadapi tantangan keamanan dan ancaman penyakit menular.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan kerjasama yang terjadi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), kerjasama yang dilaksanakan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui BIMP-EAGA juga menunjukkan pertumbuhan yang tidak kalah pesat. Inisiatif kerjasama sub-regional BIMP-EAGA secara resmi dibentuk pada tahun 1994 sebagai strategi kunci dari pemerintah negara-negara yang berpartisipasi untuk mengangkat perkembangan sosial dan ekonomi wilayah mereka yang kurang berkembang dan terpencil. Sasaran utamanya adalah untuk percepatan peningkatan perdagangan, investasi dan pariwisata di sub-regional yang meliputi Brunei; Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Papua di Indonesia; Sabah, Sarawak, Labuan di Malaysia; dan Mindanao serta Palawan di Philipina. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengubah perekonomian BIMP-EAGA yang berdasarkan non-sumberdaya. Secara signifikan, perkembangan pengelompokan sub wilayah ini terletak pada sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan dengan pemerintah sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pendukung yang memungkinkan promosi investasi sektor swasta.

Kerangka institusi sub-regional telah dirancang bagi operasionalisasi BIMP-EAGA. Pertemuan Pejabat Senior (*Senior Officials Meeting*) dan Pertemuan Tingkat Menteri (*Ministerial Meeting*) merupakan mekanisme utama

untuk konsultasi antara negara partisipan. Selain itu, kelompok Kerja (*Working Group*) juga dibentuk sebagai mekanisme operasional dari pelatihan kerjasama untuk beberapa isu dan permintaan. Konsisten dengan perjanjian untuk mengadopsi struktur yang desentralisasi, perwakilan departemen dari negara partisipan ditunjuk sebagai Sekretariat Nasional (Seknas). Seknas menyediakan dukungan administratif dan secara cepat menjadi *focal point* bagi pertukaran informasi dan koordinasi program-program yang terkait dengan wilayah pertumbuhan, dan memegang tugas untuk memastikan bahwa inisiatif di dalam negeri dipelihara. Sebagai respon terhadap inisiatif sektor publik, sektor swasta membentuk *East ASEAN Business Council* (EABC). EABC ini kemudian dikenal sebagai perwakilan resmi sektor swasta di BIMP-EAGA dan di tahun 1997 diberi status negara kelima yang mengizinkan sektor swasta memiliki delegasi sendiri yang terpisah ketika SOM/MM.

Pada tiga tahun pertama pembentukannya telah terjadi penguatan ikatan negara anggota melalui berbagai pertemuan, kegiatan dan aktifitas sub-regional. Telah dibentuk pula proyek usaha bersama di bidang agribisnis, pariwisata, transportasi, dan perdagangan. Hubungan transportasi udara dan laut untuk tujuan EAGA juga telah dibuka. Lalu lintas pengunjung lintas batas meningkat. Bisnis ke luar wilayah kerjasama serta hubungan dan jaringan sosial meluas. Begitu pula hubungan organisasi EAGA dengan mitra kerja luar negeri seperti Australia, Jepang, Papua, dan negara lain kepulauan pasifik lainnya.

Namun demikian, perkembangan di wilayah sub-regional secara serius mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dan munculnya fenomena El Nino yang melanda hampir seluruh wilayah pada tahun 1998. Pada akhir dekade, masalah perdamaian dan keter-

tiban di beberapa wilayah sub-regional mempengaruhi seluruh wilayah BIMP-EAGA yang mengalami kemunduran oleh persepsi dan asosiasi yang telah mengakibatkan penurunan di sektor pariwisata, perdagangan, dan hilangnya kepercayaan para investor. Setelah krisis berlalu dan perhatian ekonomi tertuju pada pemulihan ekonomi, pembaharuan kepentingan dalam kerjasama ekonomi bangkit kembali di tahun 2001. Selama *ASEAN Leader Summit ke-7* pada bulan November 2001 di Brunei Darussalam, para pemimpin BIMP memperbaharui komitmen dan dukungan mereka atas inisiatif kerjasama ekonomi EAGA, mencari jalan untuk revitalisasi aktifitas pengembangan di daerah perbatasan.

Bersamaan dengan pembaharuan kepentingan untuk merevitalisasi EAGA, muncul perasaan yang kuat bahwa perubahan lingkungan regional dan ekonomi global saat ini lebih besar mempengaruhi pespektif pembangunan sub-regional itu sendiri. Sementara perdagangan intra-EAGA tetap sebagai suatu sasaran, mempromosikan perkembangan perdagangan EAGA dengan wilayah lain dan pasar global dianggap sebagai suatu tujuan yang sama pentingnya. Saat ini EAGA telah merubah pendekatan pembangunannya untuk lebih meningkatkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) mereka di pasar dunia sebagai suatu kawasan melalui konsolidasi lintas batas, komplementasi, pengelompokan industri, dan manajemen rantai nilai.

Beberapa tahun terakhir juga terlihat berbagai usaha yang dilakukan untuk merestrukturisasi dan memperbaiki mekanisme institusional EAGA dalam merespon arah perkembangan baru ini dengan lebih baik. Krisis Asia telah memperlihatkan kerapuhan inisiatif EAGA atas perubahan yang mendadak di dalam agenda perkembangan nasional dari negara partisipan. Meskipun skema regionalisme terbuka dan kerjasama informal telah menyediakan

fleksibilitas yang lebih besar dalam mengadopsi proses dan mekanismenya, struktur organisasi yang lebih longgar masih sangat diharapkan guna menghadapi berbagai kendala agar dapat mengatasi langkah yang lambat dan kurang fokus dalam prioritas dan implementasi proyek-proyeknya. Untuk itu kerangka kerjasama institusional EAGA secara luas telah diformulasikan di tahun 2004. Salah satu di antara perubahan struktural saat ini adalah pembentukan *BIMP Facilitation Center* (BIMP FC) yang diasumsikan sebagai pusat koordinasi peran diantara institusi-institusi EAGA; pengelompokan kelompok kerja sub-regional; dan restrukturisasi EABC menjadi *BIMP-EAGA Business Council* (BEBC).

Pada SOM ke-12/MM ke-9 di Balikpapan pada bulan November 2004, telah disepakati penyusunan *BIMP-EAGA Roadmap to Development*, yang akan mengidentifikasi target yang luas untuk sub-regional dan target *cluster* /sektor spesifik yang akan mengarahkan implementasi berbagai proyek dan aktifitas EAGA. Dengan bantuan ASEAN Sekretariat, BIMP-FC telah diberi tugas untuk mempersiapkan *draft* pertama dari *roadmap*. Dengan dukungan *Technical Assistance* (TA) dari *Asian Development Bank* (ADB) dan *German Technical Cooperation Agency* (GTZ), dan panduan dari ASEAN, BIMP-FC telah mempersiapkan beberapa versi dari *draft roadmap* setelah beberapa proses pengumpulan, validasi dan masukan konsolidasi dari EAGA *stakeholders*.

Selain perkembangan, manfaat dan hambatan yang sifatnya spesifik dari tiap KESR di atas, terdapat banyak hambatan dan tantangan umum yang harus dihadapi oleh KESR. Sekretariat ASEAN (1997), misalnya, menyatakan bahwa meskipun tercapai keberhasilan relatif dalam mendorong kerjasama ekonomi pada level sub-regional, wilayah-wilayah pertumbuhan dihadapkan pada sejumlah persoalan. *Pertama*, tiap negara memiliki persepsi keuntungan yang tidak

sama atau merata. *Kedua*, ketiadaan infrastruktur pendukung yang tidak memadai. *Ketiga*, struktur pengambilan keputusan seringkali kompleks dan memakan waktu yang panjang. *Keempat*, terhambatnya mobilitas tenaga kerja dan perbedaan tingkat kesejahteraan tenaga kerja.

Sementara itu, Tan (1997) memaparkan berbagai tantangan dan masalah tiap-tiap bidang yang mungkin dihadapi oleh KESR. Di bidang politik, hambatan dapat timbul dari perbedaan dalam sistem politik, ketiadaan kemauan politik pemerintah (*political will*), dan pertentangan atas batas wilayah. Dari sisi histories, perbedaan kondisi awal atau bawaan sejarah merupakan salah satu tantangan yang cukup penting. Di bidang budaya, permasalahannya mencakup kesamaan etnisitas dan kebudayaan. Di bidang ekonomi, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: perbedaan sistem ekonomi, perbedaan

## PERAN APINDO DALAM PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI SUB-REGIONAL

APINDO dalam KESR berperan mendukung Tim Diskusi dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia terutama dalam bidang Ketenagakerjaan dan Perburuhan. Adapun substansi yang dikontribusikan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan termasuk Peraturan Dasar yang terkait dengan KESR.
2. Mengajukan usulan agar hambatan mobilitas *worker migration* dapat dihilangkan tanpa mengurangi aspek keamanannya seperti fiskal keberangkatan keluar negeri, adanya MOU tentang prosedur penggunaan tenaga kerja asing yang lebih jelas dan aman antar negara pemasok dan negara penerima.

3. Memberikan informasi tentang ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi jumlah maupun mutu SDM-nya.

Dalam dinamika proses pembicaraan secara internal maupun dalam forum KESR APINDO mengkontribusi segala pengalaman di lapangan yang menyangkut berbagai hal termasuk mekanisme fiskal, perpajakan, moneter, bahkan seringkali memberikan pengalamannya tentang budaya dan adat istiadat lokal yang berkaitan dengan investasi dan usaha ekonomi seperti infrastruktur fisik, birokrasi dan keadaan geografi serta potensi-potensi ekonomi.

### PENUTUP

Dalam dua dekade terakhir, KESR dalam lingkup regional ASEAN telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin bertumbuh-kembangnya kerjasama SIJORI pada tahun 1990 yang kemudian berkembang luas menjadi IMS-GT, IMT-GT, serta BIMP-EAGA. Kerja sama ini juga telah cukup berhasil meningkatkan perdagangan, investasi, dan pariwisata di wilayah-wilayah yang tercakup dalam kerjasama tersebut dan daerah-daerah sekitarnya.

Meskipun demikian, masih banyak hal yang meski dilakukan untuk merealisasikan potensi kerjasama-kerjasama sub-regional secara penuh. Selain memperluas cakupan geografis, ada pula kebutuhan untuk pemerintah negara-negara yang berpartisipasi untuk secara lebih jauh meliberalisasi berbagai kebijakan dan peraturannya yang berdampak pada terciptanya investasi lintas batas dan pergerakan manusia dan barang, menciptakan dan memperkuat lingkungan yang kondusif bagi peningkatan peran serta dan daya saing sektor swasta, serta meningkatkan konektivitas di wilayah-wilayah yang tercakup dalam kerjasama-kerjasama sub-regional tersebut.

Berdasarkan pertimbangan itulah maka sejak awal APINDO turut aktif dalam mendukung tumbuh-kembangnya kerjasama ekonomi sub-regional ini. Berbagai pengalaman di lapangan yang dimilikinya, APINDO secara aktif mendukung Tim Diskusi dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dengan memberikan berbagai informasi dan mengajukan berbagai usulan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan perburuhan.

Guna terus memajukan perkembangan kerjasama-kerjasama sub-regional ini, terdapat beberapa saran atau masukan yang mungkin meski harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Indonesia. **Pertama**, liberalisasi berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif untuk investasi, perdagangan, dan pariwisata meski terus dilakukan dan ditingkatkan. **Kedua**, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah, meski harus ditingkatkan. Koordinasi dan sinkronisasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah yang daerahnya termasuk dalam kerjasama ekonomi sub-regional saja, tapi juga pemerintah daerah sekitarnya. Dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi itu pula, pengembangan daerah-daerah pusat pertumbuhan (KAPET) yang selama ini telah dilakukan perlu dikaitkan dengan konteks pengembangan kerjasama ekonomi sub-regional yang ada. **Ketiga**, ketidakmerataan ketersediaan infrastruktur antar wilayah-wilayah yang termasuk dalam kerjasama ekonomi sub-regional, khususnya yang terjadi di KTI, telah menghambat berkembangnya investasi, perdagangan dan pariwisata di kawasan tersebut relatif dengan kawasan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur sangat perlu ditingkatkan dan dipercepat lagi. Untuk itu pemerintah dapat mengajak pihak swasta untuk turut berperan serta dengan mem-

berikan berbagai kemudahan dan insentif. **Keempat**, perlu adanya penguatan kinerja kelembagaan dan pelayanan pemerintah daerah serta penguatan kapasitas/kemampuan dan daya saing dunia usaha dan swasta daerah, terutama untuk wilayah KTI. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pendidikan/pelatihan, pemberian informasi akses pasar, dan bantuan permodalan. **Kelima**, dalam menyusun strategi pengembangan KESR ini, mengoptimalkan berbagai forum dan pertemuan koordinasi yang telah ada selama ini perlu terus dilakukan dalam merumuskan langkah kebijakan dan operasionalisasi kebijakan yang terkait, baik itu antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antara pemerintah dan dunia usaha. Untuk itu diperlukan peningkatan inisiatif dan motivasi dari kalangan dunia usaha untuk lebih aktif dan inisiatif terhadap rencana pengembangan kerjasama ini, dimana pemerintah selanjutnya hanya bertindak selaku fasilitator dan regulator saja. **Keenam**, guna memanfaatkan kerjasama ekonomi sub-regional ini menjadi lebih optimal, diperlukan adanya studi ataupun suatu evaluasi kinerja (*performance assesment and evaluation*) terhadap kesepakatan-kesepakatan yang selama ini telah terjadi. Hal ini penting guna menilai kelemahan dan sekaligus mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan terhadap perencanaan langkah dan strategi selanjutnya. (RU)

### Daftar Pustaka

- Abonyi, George. 1994. "Growth Triangle in Southeast Asia: Strategy for Development"  
 Than, Mya. 1997. "Economic Co-operation in the Greater Mekong Subregion".  
*Asian-Pacific Economic Literature* 11 (2): P.40-57.

\*) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

# Dampak Penerapan KESR BIMP-EAGA Terhadap Pengembangan Ekonomi Kawasan Di Provinsi Kalimantan Timur

Oleh :

H. Sulaiman Gafur \*)

## PENDAHULUAN

Dalam upaya mengejar ketertinggalan, keterbatasan infrastruktur yang memadai, mengurangi kemiskinan, sekaligus untuk menciptakan pemerataan pembangunan, khususnya percepatan pertumbuhan ekonomi di perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan keputusan untuk mendaftarkan diri ikut serta dalam forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA (Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philipina *East ASEAN Growth Area*). Hal ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No. 510/SK.206/1995 tanggal 12 Juni 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tingkat Daerah BIMP-EAGA Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) BIMP-EAGA adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan daerah-daerah yang secara geografis terletak di sekitar perbatasan antara satu negara dengan negara-negara lainnya yang dibentuk pada tanggal 26 Maret 1994 di Davao City melalui penandatanganan *Agreed Minutes* pada pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA sebagai realisasi dari keinginan atau cita-cita kepala Negara. KESR BIMP-EAGA ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perdagangan dan pariwisata, meningkatkan daya saing dan kesiapan daerah menghadapi era globalisasi serta mengurangi besarnya perbedaan tingkat kemajuan ekonomi.

Keterlibatan Kalimantan Timur bisa dilatarbelakangi bahwa di wilayah ini tersimpan berbagai potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa komoditas unggulan yang sangat potensial dan prospektif untuk dikembangkan antara lain dari sektor perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, tenaga kerja serta sektor industri pengolahan sumberdaya alam.

Selain memiliki potensi sumberdaya alam, Kalimantan Timur juga memiliki potensi lain berupa luas wilayah dan posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi regional, nasional maupun internasional.

Begitu pentingnya kerjasama ini sehingga Presiden RI pada saat menghadiri ASEAN Summit ke 12 dan 3<sup>rd</sup> BIMP-EAGA *Leaders Summit* di Cebu, Philipina pada bulan Januari 2007 mengeluarkan imbauan meminta seluruh Gubernur yang daerahnya masuk dalam Kerjasama Ekonomi Sub Regional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand-*Growth Triangle*) dan BIMP-EAGA untuk sigap memanfaatkan peluang dari apa yang telah dihasilkan dalam KTT tersebut. Indonesia memiliki kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan pengembangan kluster-kluster BIMP-EAGA mengingat masih banyaknya potensi serta sumberdaya manusia yang perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan.

BIMP-EAGA telah menjadi perhatian dari negara-negara ADB, termasuk Jepang, Korea, dan China. Ketertarikan negara-negara tersebut dalam rangka membantu perkembangan ekonomi di wilayah BIMP-EAGA yang pada dasarnya

juga membuka pasar bagi pertumbuhan negara-negara tersebut. Selain itu, BIMP-EAGA merupakan alternatif pengembangan jalur niaga dengan negara-negara lain, seperti Australia. Dalam hal ini, Australia melihat bahwa masih banyak potensi yang bisa digarap dalam kerjasama BIMP-EAGA yang dapat dikembangkan melalui berbagai bantuan teknis yang diberikan oleh Australia. Nilai strategis lainnya ialah kecenderungan saat ini bahwa negara BIMP-EAGA akan menjadikan daerah-daerah belakang (Kawasan Timur Indonesia) untuk menjadi *Front Area* dalam mengembangkan potensi ekonominya di wilayah-wilayah perbatasan.

Hal tersebut sejalan dengan misi BIMP-EAGA yaitu untuk pembangunan wilayah ASEAN Timur dan mengangkat taraf hidup penduduk di wilayah tersebut melalui kerjasama ekonomi regional yang saling menguntungkan. Misi yang akan dijalankan berupa memaksimalkan keunggulan komparatif, komplementaritas di antara wilayah sub-region, penggunaan optimal sumberdaya alam, teknologi dan informasi, upaya bersama untuk mengatasi hambatan pembangunan ekonomi, dan ekspansi aktif intra industri dan *intra-firm trade*.

## POTENSI DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR

Sesuai Keputusan Menteri Negara Pembangunan daerah Tertinggal mengenai Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, di Kalimantan Timur terdapat 3 (tiga) kabupaten yang masuk dalam kategori Daerah Tertinggal yaitu : Kabupaten Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat. Ketiga Kabu-

paten tersebut sebagian besar berada pada kawasan pedalaman yang notabene-nya juga adalah kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan Kalimantan Timur merupakan kawasan yang luasnya meliputi  $\pm 57.731,64 \text{ km}^2$  atau 23,54% dari luas Kalimantan Timur, dengan potensi yang cukup besar namun kontribusinya terhadap pembangunan relatif masih kecil. Kawasan ini terdiri dari 37 kecamatan, 12 kecamatan diantaranya berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Sebuku, Nunukan, dan Sebatik di Kabupaten Nunukan; Kayan Hulu, Kayan Hilir, Bahau Hulu, dan Pujungan di Kabupaten Malinau; serta Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan jumlah desa perbatasan sebanyak 548 desa.

Posisi kawasan perbatasan Kalimantan Timur terletak diantara 3 (tiga) negara yaitu Malaysia (Sabah dan Sarawak), Brunei Darussalam, dan Philipina yang secara nasional maupun regional mempunyai nilai sangat strategis pada jalur pelayaran lintas laut antarpulau Sulawesi dan Philipina serta dengan wilayah Indonesia lainnya. Keunggulan lokasi ini dalam kedekatan dan kemudahan pencapaian ke pusat simpul di bagian Utara Kalimantan, yaitu Kota Tawao (Malaysia), merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya barang-barang komoditas hasil pertanian dan perikanan Indonesia. Di sisi lain kawasan perbatasan memiliki potensi bagi pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan, pengembangan peternakan, potensi sumberdaya alam seperti batu bara, gips, pasir kuarsa, besi, kaolin, timah hitam yang belum tergali, kecuali emas.

Oleh karena itu upaya-upaya percepatan pembangunan melalui pengolahan sumberdaya di kawasan tersebut perlu didukung oleh semua pihak dan merupakan peluang bagi dunia usaha untuk terlibat dan berperan lebih besar dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Di sektor perdagangan, Kecamatan Nunukan merupakan perbatasan yang potensial untuk membuka hubungan dagang secara lebih intensif dengan Malaysia. Hubungan dagang yang terjadi sekarang cukup besar kuantitasnya sehingga perlu dilakukakan koordinasi dan pengawasan. Perdagangan kedua negara sampai saat ini banyak tidak tercatat dan melalui jalur-jalur tidak resmi sehingga sangat marugikan pihak Indonesia. Untuk itu perlu disediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perdagangan antar negara, seperti peningkatan fungsi kontrol di pelabuhan, aparat bea cukai, dan sebagainya.

### PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tantangan yang harus dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur berkisar pada bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan, menciptakan peluang kerjasama dalam segala bidang pembangunan, dan masih terbatasnya besaran dana pembangunan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Bagi Provinsi Kalimantan Timur, keberadaan kerjasama ekonomi BIMP-EAGA memiliki makna tersendiri dalam rangka meningkatkan dan mempercepat arus pertumbuhan ekonomi. Melalui kerjasama ini, juga diharapkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan aktivitas pembangunan sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan yang saat ini masih terhitung cukup besar.

Beberapa permasalahan pembangunan kawasan perbatasan yang menjadi isu aktual dan strategis, dan perlu mendapat perhatian untuk segera ditanggulangi yakni :

1. Terbatasnya infrastruktur khususnya jalan yang menghubungkan antar-kecamatan atau antarkabupaten, sehingga hubungan transportasi dan komunikasi relatif sulit karena

memerlukan biaya yang relatif tinggi dan mengakibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi khususnya sektor perdagangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tidak berjalan dengan lancar. Untuk membangun infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai diperlukan biaya yang cukup mahal. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis pada kawasan tersebut cukup luas dengan topografi yang berbukit-bukit sampai terjal.

2. Jumlah penduduk yang sedikit dan tinggal di lokasi yang terpencar-pencar dan terisolasi, sehingga jauh dari jangkauan pelayanan pembangunan.
3. Kabupaten Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan merupakan daerah pemekaran dari status kecamatan menjadi kabupaten yang usianya baru periode pemerintahan, sehingga dapat dimaklumi kalau ketiga kabupaten tersebut termasuk dalam kategori daerah tertinggal.
4. Produksi sektor pertanian belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya prasarana dan sarana pertanian, dan belum berkembangnya industri hilir pengolahan hasil pertanian
5. Menurunnya kualitas lahan akibat eksploitasi hutan dan tambang di beberapa daerah, yang melebihi daya dukung lingkungan serta terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

### TUJUAN DAN SEKTOR PRIORITAS DALAM KESR BIMP-EAGA

Sejak tahun 2005, KESR BIMP-EAGA telah memformulasikan *Roadmap to Development and Action Plan* BIMP-EAGA 2006-2010 yang telah disepakati 4 Kepala Negara anggota BIMP-EAGA di Kuala Lumpur dengan hasil rumusan BIMP-EAGA Action Plan (2006-2010). Adapun tujuan strategis dari BIMP-EAGA adalah :

- a. Mempromosikan perdagangan, investasi, dan pariwisata intra dan ekstra EAGA dengan penekanan pada pengembangan UKM.
- b. Mengkoordinasikan perencanaan dan implementasi infrastruktur dalam mendukung integrasi ekonomi, dengan partisipasi aktif dari sektor swasta.
- c. Mengkoordinasikan manajemen sumberdaya alam.
- d. Memperkuat struktur dan mekanisme institusional BIMP-EAGA.

Perumusan *Roadmap dan Action Plan* BIMP-EAGA bertujuan untuk mendorong, memonitor, dan mengkaji ulang implementasi dari seluruh program dan proyek, serta melaksanakan peningkatan kebijakan dan dukungan yang diperlukan termasuk menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk prioritas pembangunan di EAGA. Beberapa sektor prioritas dari BIMP-EAGA mencakup diantaranya:

- a. *Transport connectivity*, yang merupakan kebutuhan penting akan konektivitas transportasi/perhubungan.
- b. Pariwisata, dengan memperkuat program pemasaran yang secara agresif mempromosikan EAGA sebagai tujuan wisata utama.
- c. Kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan.
- d. Sektor swasta, untuk mengintensifkan perdagangan, investasi, dan pariwisata lintas batas, serta membantu pembangunan BIMP-EAGA *Private Sector Development Fund*.
- e. Pemerintah daerah, dalam memformulasikan rencana tindak strategis untuk mempercepat dan memperdalam kerjasama ekonomi dan integrasi di BIMP-EAGA
- f. Penguatan kerjasama dengan *development partners*, diantaranya dengan *Northern Territory, People's Republic of China, ASEAN Secretariat, Asian Development Bank* (ADB).

Dalam rangka implementasi BIMP-EAGA *Roadmap and Action Plan*, diperlu-

kan penilaian dan evaluasi yang seksama terhadap kinerja yang ditunjukkan masing-masing klaster, serta secara optimal mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan untuk lebih meningkatkan daya saing dan daya guna kerjasama yang dilakukan bersama.

#### PROGRAM USULAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM KESR BIMP-EAGA

Untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui KESR BIMP-EAGA telah menyusun beberapa program yang dijabarkan dalam *action plan*. Dalam KESR BIMP-EAGA terdapat 4 klaster dengan *action plan* masing-masing seperti yang dijelaskan berikut ini.

##### *Cluster Small Medium Enterprises Development (SMED)*

Terdiri dari *Working Group Capital Formation and Financial Services, CIQS (Customs, Immigration, Quarantine and Security)*, dan *HRD (Human Resources Development)*. Klaster SMED berperan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dalam program pembangunan sektor UKM. Rencana kerja yang terdapat pada klaster ini meliputi :

- a. Pengembangan proyek VCO dan *palm oil industry* yang akan berdampak signifikan terhadap pengembangan UKM.
- b. Pengembangan *fisheries product*.
- c. Pengembangan UKM yang berorientasi ekspor
- d. Pengembangan produk kayu dan derivatifnya, tempurung kelapa, serta bambu.
- e. Pengembangan briket batu bara dan arang kayu
- f. Pembangunan pabrik pakan ayam dan pengalengan ikan tuna
- g. Pembuatan *trade and investment database*.

##### *Cluster Natural Resources Development (NRD)*

Terdiri dari *Working Group Agro Industry, Fisheries Cooperation, Forestry and Environment, Energy*, dan HRD. Klaster NRD menangani program dalam program bidang agro-industri, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, lingkungan, energi dan sumberdaya manusia. Beberapa *action plan* yang telah disusun seperti :

- a. Mempertahankan kelestarian kawasan budidaya kehutanan terutama di daerah perbatasan termasuk Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 708.647 Ha yang kaya dengan sumberdaya hayati dan dapat dijadikan sebagai objek wisata.
- b. Mengembangkan proyek penanaman spesies kayu untuk menjamin suplai bahan baku industri per kayuan.
- c. Kerjasama pengembangan sumberdaya energi dan mineral di daerah perbatasan.
- d. Bersama klaster lain mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan proyek investasi bersama EAGA dalam agro-industri, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, serta sumberdaya energi dan mineral.
- e. Dukungan dan fasilitasi proyek kerjasama teknis yang akan mendukung pengembangan teknologi dan langkah-langkah manajemen sumberdaya alam di EAGA.

##### *Cluster Joint Tourism Development (JTD)*

Terdiri dari *Working Group Joint Tourism Development* dan HRD. Klaster JTD mengkoordinasikan kerjasama program di bidang pariwisata dan dunia usaha seperti :

- a. Implementasi dan integrasi program pemasaran dan promosi pariwisata EAGA, dengan difokuskan pada wisata budaya, petualangan, dan alam serta selam dan golf.
- b. Meningkatkan kualitas jasa pelayanan pariwisata EAGA.

- c. Pengembangan produk dan jasa pariwisata baik yang baru maupun yang sudah eksis yang mendukung program promosi pariwisata EAGA.
- d. Menciptakan *image* dan persepsi positif bagi pariwisata EAGA, menyediakan insentif, dan dukungan kebijakan bagi investor pariwisata.
- e. Memperkuat hubungan dan jaringan kerja antar organisasi pariwisata EAGA serta dengan organisasi rekanan lainnya di ASEAN, Asia, dan pangsa pasar pariwisata lainnya.
- f. Meningkatkan *share* pada anggaran nasional yang ditujukan bagi program promosi dan pemasaran pariwisata EAGA.
- g. Melaksanakan program promosi pariwisata EAGA yang efektif dan terfokus terhadap tujuan, *even*, dan rute-rute potensial EAGA, untuk menjamin kesinambungan dari rute-rute potensial tersebut

**Cluster Transport, Infrastructure and ICT Development (TICTD)**

Terdiri dari *Working Group Air Linkage, Sea Linkage, Construction Materials, Information and Communication Technology*, dan HRD. Klaster TICTD membidangi kerjasama program yang telah dan sedang dilaksanakan di bidang infrastruktur antara lain

- a. Penuntasan proyek infrastruktur jalan EAGA meliputi : *PAN Borneo Highway*, perbatasan Malinau - Sabah; *PAN Borneo Highway*, Pontianak - Palangkaraya - Banjarmasin - Balikpapan; serta jalur Tarakan - Tawao.
- b. Mengembangkan pelabuhan baru dan meningkatkan pelabuhan yang sudah ada di kawasan EAGA, fasilitas baru penanganan *container* di Pelabuhan Kariangau (Balikpapan), Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Sepanggar, dan Pelabuhan Labuan.
- c. Mempromosikan jalur pelayaran di GSSR (*Greater Sulut-Sulawesi Ring*).

- d. Mempromosikan rute-rute perdagangan, perjalanan dan pariwisata termasuk pembentukan *code share multipoint airlinks* di EAGA.
- e. Pembangunan layanan *intercity bus express* di EAGA.
- f. Melaksanakan kesepakatan tentang arus lintas batas barang dan manusia, seperti *ASEAN Framework Agreement on Goods in Transit*, lintas kawasan EAGA.
- g. Mengembangkan fasilitas dan jasa teknologi informasi dan komunikasi di EAGA, khususnya pada daerah perbatasan untuk memfasilitasi interaksi ekonomi lintas batas yang lebih besar.

**DAMPAK KESR BIMP-EAGA PADA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Sejak tahun 1995, Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu anggota Kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA yang telah banyak menyepakati kerjasama, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Walaupun manfaatnya belum banyak menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur sebagai pelaku ekonomi menengah bawah, namun keikutsertaan Provinsi Kalimantan Timur dalam BIMP-EAGA tetap memberikan hasil yang positif. Hasil-hasil tersebut antara lain :

- a. Sejak ditandatanganinya tahun 1994, KESR BIMP-EAGA telah menunjukkan beberapa perkembangan yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bidang kerjasama ekonomi yang dilakukan antara Provinsi-Provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan negara tetangga Malaysia, Brunei Darussalam dan Philipina.
- b. Telah banyak kesepakatan yang dicapai dan selanjutnya diwujudkan dalam berbagai kegiatan operasional yang melibatkan pihak pemerintah dan dunia usaha.

- c. Di bidang pariwisata, di tahun 1997 telah dibangun fasilitas gedung Pusat Informasi Pariwisata Kalimantan Timur. Fasilitas ini berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang memerlukan informasi seputar kepariwisataan nasional, khususnya mengenai objek-objek wisata yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Di sektor transportasi, pembangunan prasarana dan sarana jalan Pelabuhan Nunukan di kawasan perbatasan terus dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan program pada kluster perhubungan dan transportasi. Melalui pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur telah dan akan melanjutkan kegiatan yang lain, diantaranya :

- Ruas jalan Kota Bangun - Melak dengan lapis permukaan aspal.
- Ruas jalan SP. Blusuh - Batas Kalimantan Tengah dengan target agregat B.
- Ruas jalan Tj. Selor - Malinau dengan lapisan permukaan sebagian aspal dan sebagian agregat B.
- Ruas jalan Malinau - Simanggaris - Batas Negara dengan target agregat B.
- Jaringan jalan lingkaran Nunukan dengan target agregat B.
- Jaringan jalan P. Sebatik dengan target lapisan permukaan aspal.
- Ruas jalan Batas Negara - Long Midang - Long Bawan dengan target agregat C (subsidi APBD Provinsi Kalimantan Timur).
- Penertiban batas kawasan antarnegara dilakukan melalui pemasangan patok-patok perbatasan, juga dengan pembangunan fasilitas pos pengamanan lintas batas. (\*\*\*)

\*) Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

# PERAN SEKRETARIS NASIONAL KESR DALAM PENGEMBANGAN KESR

Oleh :  
**Abraham Mirah**  
 Seknas KESR, Menko Perekonomian

Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Seknas KESR) dibentuk pada tahun 2005 melalui Keputusan Menko Perekonomian No. KEP-29/M.Ekon/06/2005. Berdasarkan keputusan ini, *Country Director BIMP-EAGA Business Council* (BEBC) Indonesia sebagai Ketua Seknas KESR, National Director IMT-GT Indonesia sebagai Wakil Ketua I, Kepala BKPM sebagai Wakil Ketua II, dan sebagai anggotanya terdiri dari para Gubernur Provinsi anggota KESR dan pejabat Eselon I dari K/L terkait. Berkaitan dengan itu, maka wawancara kali ini dilakukan dengan Abraham Mirah selaku pelaksana Seknas KESR untuk mengetahui latarbelakang pembentukan Seknas KESR beserta sepak terjang yang telah dilakukan. Berikut ada cuplikan wawancara dengan beliau.

**Apa yang melatarbelakangi pemerintah akan pentingnya melakukan pengembangan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) seperti dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Australia, dan lain-lain?**

Latar belakang Indonesia dalam melakukan KESR adalah pertama karena komitmen Indonesia dalam kerjasama bilateral, regional dan multilateral seperti Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Asia Regional Forum* (ARF), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang memerlukan jaminan dukungan dan pelaksanaannya. Dengan diterapkannya otonomi daerah, maka diperlukan suatu media untuk memfasilitasi, menjembatani, dan mengkomunikasikan keikutsertaan dan komitmen pemerintah dalam bentuk-bentuk kerjasama tersebut. Berdasarkan harmonisasi *Rules, Regulation and Procedures* (dalam kerjasama tersebut diatas) dan keragaman potensi dan dunia usaha yang dimiliki oleh tiap provinsi yang termasuk dalam wilayah KESR, diperoleh *feedback* untuk bahan/program pemerintah memasuki

pertemuan lanjutan kerjasama tersebut. Pemerintah akhirnya membentuk beberapa KESR untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah kerjasama tersebut diatas seperti Singapore-Johor-Riau (Sijori) kemudian berganti nama menjadi Indonesia-Malaysia-Singapore *Growth Triangle* (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA), dan Australia-Indonesia *Development Area* (AIDA).

**Apa dasar hukum kebijakan implementasi yang menjadi acuan dalam pengembangan KESR tersebut.?**

Ada beberapa dasar hukum dalam pengembangan KESR, yaitu Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Kepmenko Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional No. Kep/29/M.EKON/06/2005 Tahun 2005 tentang Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Seknas

KESR), Keputusan Ketua Seknas KESR No. SK.01 057/SEKNAS KESR/VII/05 tentang Staf Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional, dan terakhir adalah Keppres Presiden No. 28/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, SH sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerjasama dengan Negara-negara *East ASEAN Growth Area*.

**Bagaimana konsep kebijakan dan strategi pemerintah dalam melaksanakan pengembangan Kerjasama Ekonomi Subregional?**

Kerjasama Ekonomi Sub Regional antara daerah-daerah di Indonesia dengan negara tetangga, baik yang akan dikembangkan maupun yang selama ini telah dikembangkan, perlu terus didorong karena memegang peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut.

**Adakah dasar kebijakan perencanaan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk berkontribusi dalam pengembangan KESR?**



Dasar kebijakan perencanaannya cukup banyak, diantaranya : (1) Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional, (2) Kepmenko Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional No. Kep/29/M.EKON/06/2005 Tahun 2005 tentang Sekretariat Nasional Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Seknas KESR), (3) *1st Joint Statement Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Philippines East ASEAN Growth Area Leaders' Meeting*, Bali, 6 October 2003, (4) *2nd Joint Statement Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area Summit*, Kuala Lumpur, 11 December 2005, (5) *3rd Joint Statement Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area Summit*, Cebu City, Philippines, 12 January 2007, (6) *4th Joint Statement Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area Summit*, Singapore, 19 November 2007, (7) *1st Joint Statement the Summit of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*, Kuala Lumpur, 11 December 2005, (8) *2nd Joint Statement the Summit of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*, Cebu City, The Philippines, 12 January 2007, (9) *3rd Joint Statement the Summit of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*, Singapore, 19 November 2007, (10) *IMT-GT Roadmap for Development 2007-2011*, (11) *BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006-2010 and Action Plan*, (12) *BIMP-EAGA Planning Meeting*, Kota Kinabalu, Malaysia, 29-30 Januari 2007, (13) *BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting*, Kota Kinabalu, Malaysia, 14-15 Januari, 2008, (14) *IMT-GT Planning Meeting for 2007*, Kota Kinabalu, Malaysia, 31 January - 1

February 2007, dan terakhir (15) *2nd IMT-GT Annual Planning Meeting*, Phuket, Thailand, 29-30 January 2008.

**Peran dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Sekretariat Nasional KESR sejak didirikan hingga sekarang?**

Peran Seknas KESR adalah sebagai sarana untuk membina dan memelihara dan melanjutkan komitmen dengan berbagai pihak terkait antar negara anggota KESR baik secara bilateral maupun multilateral. Dengan peran ini, Seknas KESR berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultasi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkait dengan kegiatan KESR, sebagai pusat penyimpanan data, korespondensi dan materi tentang partisipasi Indonesia dalam kerjasama ekonomi, dan sebagai penyelenggaraan koordinasi dengan sebaik-baiknya dengan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat memacu pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang terkait dengan KESR. Selain itu, Seknas KESR juga berperan dalam menyelesaikan *Country Papers* bagi anggota Delegasi Indonesia dan *Chairman Notes* bagi kedudukan Indonesia tentang hal yang relevan bagi *ISOM/SOM/MMI/Summit*, mempersiapkan pendapat dan saran bagi *Annotated Agenda* dan program untuk *ISOM/SOM/MMI Summit* dan kegiatan lainnya, menyiapkan atau membagikan *Highlight/Laporan/Updates* Persetujuan yang ditetapkan di berbagai meeting atau petunjuk pimpinan, menyiapkan rencana kegiatan tahunan Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi sub-regional, melaksanakan monitoring terhadap tindakan yang dilakukan menghadapi hal-hal yang timbul dari berbagai rapat koordinasi/*working group/cluster*, dan juga melaksanakan

asistensi dalam pengorganisasian *meeting*, dimana Indonesia menjadi tuan rumah.

**Permasalahan atau kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah, serta peluang apa yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan wilayah atau kawasan dari adanya pelaksanaan KESR tersebut?**

Permasalahan dan kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumberdaya manusia (*human capital*) dan keterbatasan dukungan pendanaan (*financial support* dan *logistic*) yang dimiliki Seknas KESR untuk mengiringi atau menjaga *BIMP-EAGA Roadmap to Development 2006 - 2010 and Action Plan*, dan *IMT-GT Roadmap for Development 2007-2011*. Sedangkan peluang dengan adanya pengembangan KESR adalah perhatian dan kepedulian Kepala Negara yang terlibat KESR seperti yang terlihat pada *4th BIMP-EAGA Summit* dan *3rd IMT-GT Summit* di Singapore pada 19 November 2007 *back to back* dengan pelaksanaan *13th ASEAN Summit*, 18-22 November 2007.

**Apa saran Bapak tentang peningkatan kerjasama KESR ini, khususnya dalam meningkatkan dukungan kementerian/lembaga terkait guna memanfaatkan peluang yang ada, sehingga turut memberikan dampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan.**

Saran saya adalah menindak lanjuti rekomendasi ADB TA 4555-INO tentang *Strengthening The National Secretariat for Regional Cooperation*.

(YR)

## Small Workshop dalam rangka Penyusunan Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2007



Berbagai bencana telah terjadi di Indonesia, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, seperti banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung api, kebakaran hutan, dan kegagalan teknologi. Kapan dan dimana, apa penyebabnya, serta bagaimana upaya penanggulangan bencana tersebut dari yang telah ditulis dalam berbagai versi data dan laporan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah perlu dikompilasi, dianalisis, dan disusun dalam suatu profil Buku Data Bencana Indonesia yang terjadi selama tahun 2007. Hal ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan upaya-upaya penanganan bencana di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya buku tersebut dapat menyajikan himpunan data dan informasi kejadian bencana di Indonesia, khususnya selama tahun 2007. Selain itu, dengan adanya buku ini diharapkan adanya pemahaman mengenai penggunaan *software Des-Inventar* yang digunakan untuk pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilakukan tahapan-tahapan yang terdiri dari : (1) *Small workshop* dalam rangka persiapan penyusunan Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2007 dan pengenalan *software Des-Inventar*; (2) Konsinyasi dalam rangka pembahasan *draft* awal; (3) Konsinyasi perbaikan *draft*; (4) Finalisasi buku data bencana; dan (5) Pencetakan buku.

Sebagai tahap, dilaksanakan *small workshop* yang diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2008 di Ruang Melati, Hotel Millenium, Jakarta. Acara yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat/staf Lakhur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan perwakilan pejabat dari instansi terkait lainnya yang difasilitasi oleh SCDRR (*Suffer Communities through Disaster Risk Reduction*) Project. Pesertanya meliputi pejabat/staf di lingkungan pemerintah terkait, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Energi dan Sumber-daya Mineral, Departemen Kehutan-an, Basarnas, PMI, dan TNI/Polri, serta UNDP.

Pembukaan acara dilakukan oleh Bapak Priyadi Kardono selaku Kepala Biro Data pada BNPB. Dalam kata sambutannya, Bapak Priyadi Kardono menyampaikan akan pentingnya Penyusunan Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2007 dan *software Des-Inventar* dalam kerangka penanganan bencana di Indonesia. Selanjutnya, Bapak Priyadi Kardono memaparkan mengenai Draft Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2007. Mengenai metode pengumpulan data, seperti yang dijelaskan dalam paparan Bapak Priyadi, diperoleh dari Satkorlak/Satlak dan institusi terkait yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi di BNPB. Dalam proses pengumpulan data ini terkendala pada rekapitulasi data. Bencana bisa saja terjadi lintas wilayah administrasi, namun data yang terkumpul hanya per wilayah administrasi.

Sebelum melanjutkan pada paparan berikutnya, dilakukan diskusi

antara peserta dengan BNPB, diantaranya : perlu kesamaan persepsi terminologi masing-masing bencana agar tidak terjadi kesalahan *inputting* data. Untuk itu, BNPB merencanakan membentuk semacam forum diskusi yang akan melakukan pertemuan secara berkala akan berbagai hal terkait kebencanaan.

Paparan kedua oleh UNDP yang menjelaskan mengenai Pengenalan *Software Des-Inventar* sekaligus mendemonstrasikan *software* tersebut. Dalam paparan tersebut dijelaskan mengenai *software Des-Inventar*, yaitu *software* yang menganalisis data dan memahami risiko bencana didasarkan kejadian-kejadian dan dampak bencana alam. *Software* ini telah dipergunakan oleh 20 negara di Amerika Latin dan Karibia. Untuk di Asia sendiri, *software Des-Inventar* telah dipergunakan di Sri Lanka, Nepal, Maldives, Iran, India, dan Indonesia. Seperti halnya pada paparan sebelumnya, setelah paparan kedua dilakukan diskusi antara peserta dengan UNDP. Pertanyaan yang diajukan peserta umumnya bersifat teknis, misalnya mengenai pengumpulan data dan siapa yang akan menjadi operator.

Setelah dilakukan dua sesi paparan dan diskusi, acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis *software Des-Inventar* dari UNDP yang diwakili oleh Ibu Irawati Hapsari kepada BNPB yang diwakili oleh Bapak Priyadi Kardono.

Sebagai hasil dari *small workshop* ini, diperoleh tiga poin kesimpulan, yaitu : (1) Perlu pertemuan lanjutan untuk mengerucutkan validasi data bencana tahun 2007; (2) Diperlukan Forum Komunikasi Data dan Kebencanaan yang membahas berbagai hal terkait data dan bencana yang ada di Indonesia; dan (3) *Software Des-Inventar* akan digunakan oleh BNPB dan dapat diakses oleh sektor lain namun perlu untuk dipe-lajari dan dipahami dan perlu penam-bahan item yang akan disesuaikan dengan kondisi kebencanaan di Indonesia.(BH)

## Misi Supervisi PNPM Mandiri (P2DTK) ke Provinsi Kalimantan Barat

Perkembangan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dilaksanakan di 10 provinsi, 51 kabupaten, dan 186 kecamatan. Untuk P2DTK NAD-Nias telah dimulai sejak September 2006, dan untuk P2DTK Nasional sendiri baru dimulai setahun kemudian, yaitu pada September 2007.



Dalam rangka mengevaluasi proses kegiatan program di lapangan, maka Bappenas bersama Dirjen PMD-Depdagri, KPDT, BRR NAD-Nias, Bank Dunia, multidonor, dan konsultan pusat melakukan misi supervisi di delapan provinsi. Pelaksanaannya melibatkan partisipasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, DPRD, Bappeda, PMD, Camat, dinas dan aparat terkait lainnya, serta konsultan, baik konsultan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, termasuk pendamping lokal, tim kajian teknis, tenaga penggerak kesehatan masyarakat, komite sekolah, dan masyarakat. Dimulai dari Provinsi NAD, Sumut, NTT, Kalteng, Sulteng, dan Maluku yang berlangsung serentak dari tanggal 9 hingga 14 Mei 2008, kemudian dilanjutkan di Provinsi Lampung pada tanggal 28, dan untuk Provinsi Kalbar dilaksanakan pada tanggal 17-22 Juni 2008 di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sanggau. Adapun tim supervisi PNPM Mandiri (P2DTK) untuk di Provinsi Kalbar terdiri dari Sri Kuntari dan Zabihullah Wardak dari *World Bank*, serta Sasli Rais dan Indri Dwiastuti dari UPP/PMU Bappenas.

Hasil misi supervisi PNPM ke Provinsi Kalimantan Barat menemukan beberapa kendala permasalahan di lapangan, diantaranya :

- a. Perencanaan P2DTK masih belum *link* dengan waktu pelaksanaan karena kendala proses yang berbeda dengan musrenbang yang reguler.
- b. Belum tersosialisasikannya perubahan penetapan BLM untuk tahun 2008 sehingga memunculkan kebingungan pelaku di lapangan.
- c. Belum dapat dicairkannya DAK 2008 yang disebabkan oleh adanya perubahan administrasi di Sambas.
- d. Kurang cepatnya KM-Kab dalam menangani setiap .
- e. Belum adanya umpan balik dari setiap laporan bulanan yang dibuat oleh konsultan NMC.
- f. Sering terjadinya keterlambatan surat dari PIU KPDT ke daerah, serta adanya sirat-surat dari KPDT yang tidak ditembuskan ke sekretariat PMU sehingga berakibat pada kurang terinformasikannya perkembangan oleh sekretariat.
- g. Masih adanya pelaku program yang kurang memahami penanganan masalah yang terjadi, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat.
- h. Hasil identifikasi Bappeda mengatakan bahwa program PNPM dapat melunturkan modal sosial, seperti gotong royong di masyarakat, termasuk adanya "mental miskin" dalam masyarakat.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- Sehubungan dengan sosialisasi program, perlu adanya media sosialisasi yang mudah sampai ke masyarakat, seperti pemasangan papan informasi yang di tempat-tempat strategis (musholla, masjid, gereja, kelen-teng), leaflet, brosur-brosur oleh konsultan PIU.
- PIU KPDT perlu mengirimkan surat penjelasan tentang adanya perubahan alokasi BLM kecamatan dengan alokasi sebelumnya.
- Sehubungan dengan keberadaan Tim Koordinasi, sebaiknya PIU KPDT mengeluarkan surat ke daerah untuk pembentukan tim koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari surat Kesra untuk satu Tim Koordinasi PNPM Mandiri utamanya di tingkat kecamatan.
- PIU KPDT perlu mengeluarkan surat secara tegas kepada pelaku di daerah agar tidak ada *double job* berkaitan dengan program PNPM Mandiri untuk optimalisasi peran dan menghindari adanya konflik kepentingan.
- Sehubungan dengan bentuk pelaporan TK, PIU KPDT secepatnya membuat keseragaman format pelaporan untuk tim koordinasi.
- PIU KPDT segera mengirimkan Panduan Optimalisasi Program ke daerah segera untuk mempercepat pelaksanaan optimalisasi.
- Perlu segera dilakukan pelatihan penyegaran yang sesuai dengan kebutuhan konsultan dan TK (Satker) di lapangan.(SR)

# Kerjasama Perdagangan Internasional

## Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia



Judul : Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan bagi Indonesia  
 Penulis : Tim Penulis Biro Hubungan dan Studi Internasional Direktorat Internasional  
 Editor : Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles P.R Joseph  
 Halaman : 367 hlm + xxv  
 Cetakan : 2004  
 Penerbit : Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta

Buku mengenai Kerjasama Perdagangan Internasional ini disusun oleh tim penulis dari Bank Indonesia sebagai bagian dari kontribusinya pada pengembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas negara. Buku ini terdiri dari 7 bab dan bercerita secara tersegmentasi sesuai pengelompokan topik. Pada Bab I dan II dijelaskan mengenai *background* teori dan konsep perdagangan Internasional, sedangkan Bab III, IV, dan V secara berurutan membahas mengenai kerjasama multilateral, regional, dan bilateral. Baru pada 2 bab terakhir, tim penulis berupaya merumuskan strategi dan langkah kedepan berdasarkan himpunan informasi peluang dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia kedepannya. Berikut adalah paparan substansi singkat dari buku tersebut.

### MENGAPA PERLU KERJASAMA PERDAGANGAN ANTARNEGARA?

Banyak alasan mengapa negara-negara pada akhirnya terlibat dalam perdagangan antarnegara. David Ricardo, Eli Keckscher, dan Berthil Ohlin mengedepankan teori keunggulan komparatif, yakni perdagangan terjadi karena adanya perbedaan kapasitas antarnegara dalam faktor produksi. Sebagian lainnya, berpendapat bahwa

perdagangan ada hubungannya dengan perbedaan preferensi kebutuhan antar-negara, atau hubungan kausal dari kebijakan perdagangan itu sendiri.

Derasnya arus fenomena globalisasi perdagangan secara signifikan memberikan perubahan positif pada suatu negara dan perubahan negatif pada lain negara memaksa banyak negara mempertanyakan pentingnya untuk terlibat dalam kancah perdagangan global. Banyak negara berkembang dan miskin yang merugi akibat pembukaan akses perdagangan dunia. Pembukaan pasar ini oleh sebagian pihak dinilai hanya menguntungkan negara-negara besar. Sebagian lainnya mengemukakan bahwa globalisasi perdagangan ini hanya melahirkan bentuk perbudakan dan penjajahan versi terbaru. Disisi lainnya, globalisasi juga dipuji oleh sejumlah negara sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Buku ini berupaya memaparkan secara proporsional dampak globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan diharapkan dapat dilihat secara objektif, yakni dapat memberikan dampak positif ataupun negatif kepada perkembangan ekonomi suatu negara, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan kemiskinan, tergantung dari kesiapan setiap negara. Melalui, diantaranya: pene-

rapan tata pemerintahan yang baik, penegakan hukum, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, pihak yang pro globalisasi percaya bahwa globalisasi perdagangan akan memberikan perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, kejelian para praktisi kebijakan dan pelaku usaha dalam menilai dampak dari strategi, regulasi dan perjanjian perdagangan antarnegara dinilai berkontribusi secara signifikan dalam upaya mencapai konsep kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan. Lebih jauh lagi, berbedanya tingkat kesiapan sebuah negara dalam konteks perdagangan global, harus disikapi dengan perbaikan kemampuan dan daya saing negara, serta fleksibilitas penerapan sesuai tingkat kesiapannya.

### BENTUK-BENTUK KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

#### I. Multilateral

WTO adalah suatu lembaga perdagangan internasional yang dikupas secara tuntas pada Bab III. WTO dinilai telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan sistem perdagangan multilateral.

WTO didirikan dengan maksud menciptakan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil. Dijelaskan

pula, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 5 fungsi utama WTO. Terlepas dari banyaknya harapan dan kritik yang dituai organisasi tersebut, tingginya tingkat keanggotaan negara, yakni mencapai 150 negara, menjadi bukti bahwa organisasi ini telah secara signifikan menghembuskan pemikiran liberalisasi perdagangan di dunia.

Pada bab yang sama, dibahas pula mengenai status komitmen Indonesia dalam WTO dan kedepannya. Pada prinsipnya Indonesia berperan aktif mendukung kebijakan WTO yang telah disepakati bersama, dan menempatkan forum multilateral sebagai prioritas utama disamping forum regional dan bilateral. Komitmen yang diberikan oleh Indonesia diantaranya: pembukaan akses pasar dan perlakuan nasional, lebih jauh lagi, penentuan besaran tarif, penghapusan *non tariff barrier*, dan pembukaan sektor-sektor tertentu sesuai kesepakatan juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia.

## II. Regional

ASEAN merupakan organisasi regional yang dipercaya sebagai cikal bakal dari kerjasama ekonomi khususnya, khususnya perdagangan di Asia Tenggara, bahkan ditengarai juga sebagai cikal bakal kerjasama di Asia Pasifik. Tujuan utama kerjasama ekonomi ASEAN adalah untuk meningkatkan perdagangan intra ASEAN. Kerjasama ekonomi dilatarbelakangi oleh kondisi resesi ekonomi yang disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia akibat dampak perang timur tengah, pada tahun 1976. Selain itu, terdapat pula bentuk kerjasama perdagangan regional, diantaranya:

1. *ASEAN Preferential Trade Agreement* (PTA). PTA merupakan komitmen pertama negara ASEAN dalam rangka meningkatkan perdagangan intrakawasan antara lain melalui pertukaran tarif preferensi khususnya untuk produk makanan, energi, dan produk-produk yang termasuk

dalam proyek-proyek industri ASEAN dan peningkatan bahan baku yang tersedia di kawasan.

2. *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tujuan strategis AFTA adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sebagai satu kawasan unit produksi tunggal dan pasar tunggal. Pengurangan tarif dan non tarif negara-negara ASEAN diharapkan akan menciptakan efisiensi ekonomi yang lebih besar dan peningkatan produktifitas daya saing.
3. *ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS). Latar belakang pembentukan AFAS adalah untuk melengkapi pendirian AFTA dan memperkuat jasa ASEAN dalam pasar dunia.

Lebih jauh lagi, dibahas pula mengenai manfaat dan kemungkinan dampak kontraproduktif dari kerjasama regional bagi pengembangan kerjasama perdagangan multilateral.

## III. Bilateral

Khusus di Asia kecenderungan melakukan FTA baik dalam bentuk perjanjian regional maupun bilateral salah satunya didorong oleh lambatnya kemajuan APEC dan ASEAN, ditambah ketidakpastian setelah krisis melanda Asia tahun 1997.

Pada umumnya, *Bilateral Trade Agreement* (BTA) yang telah ditandatangani di dunia saat ini dibentuk dalam 3 bentuk perjanjian, yaitu: *Bilateral Customs Union* (BCU), *Bilateral Preferential Agreement* (BPA), dan *Bilateral Free Trade Area* (BFTA).

Pada tahun 2005 jumlah BTA meningkat hingga 27, dan masih banyak perjanjian bilateral lainnya yang masih dalam proses negosiasi. Diperkirakan pada akhir 2006, jumlah BTA melonjak menjadi 300.

BCU pada prinsipnya mengikutsertakan supresi terhadap berbagai jenis diskriminasi yang ada pada perpindahan komoditas dan meliputi penerapan tarif bersama oleh pihak-pihak yang terlibat

kepada pihak-pihak yang tidak terlibat. BPA merupakan perjanjian perdagangan di negara-negara yang terlibat setuju untuk memberikan perlakuan khusus (preferensi) dalam perdagangan barang dan jasa antara satu dengan lainnya, biasanya dalam bentuk penurunan tarif. Sedangkan BFTA, hampir serupa dengan BPA yang juga meliputi penurunan atau pembebasan tarif di antara negara-negara yang terlibat perjanjian.

Seperti hanya kerjasama regional, oleh sebagian pihak yang pro kerjasama multilateral, kerjasama bilateral ditengarai memiliki dampak kontraproduktif dari bagi pengembangan kerjasama perdagangan multilateral dan stabilitas perekonomian dunia.

## PELUANG DAN TANTANGAN KERJASAMA PERDAGANGAN INDONESIA

Pada Bab VI dipaparkan mengenai komoditas-komoditas yang memiliki peluang untuk dapat kompetitif menembus pangsa pasar perdagangan dunia (orientasi ekspor), beserta peluang dan tantangan pengembangannya. Komoditas yang memiliki peluang diperdagangkan multilateral, diantaranya: *crude plam oil* (CPO), batu bara, kayu, pulp, paper, serta tekstil dan produk tekstil. Sedangkan untuk produk jasa, sektor yang kompetitif diantaranya: jasa travel, jasa telekomunikasi, dan jasa asuransi.

Permasalahan yang dihadapi dalam perdagangan regional dan bilateral diantaranya: (1) Perbedaan standarisasi produk-produk; (2) Prosedur perizinan yang berbelit; (3) Inefisiensi pengurusan pengeluaran barang yang menyebabkan bertambahnya biaya pergudangan.

Bagi Indonesia keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum kerjasama perdagangan internasional menimbulkan konsekuensi berupa tantangan ekonomi, sosial, dan politis. Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia, diantaranya meliputi kurangnya kapasitas nasional, lemahnya infrastruktur fisik, kurang kondusifnya kondisi sosial-



politik-hukum, rendahnya investasi asing, biaya ekonomi tinggi, dan tenaga kerja yang kurang kompetitif di pasar internasional.

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERDAGANGAN INDONESIA**

Kebijakan perdagangan suatu negara sangat berpengaruh pada besarnya magnitude dan pola perdagangan negara tersebut. Untuk itu dalam menetapkan kebijakan perdagangan perlu dikaitkan dengan pola pembangunan secara

bangunan infrastruktur, dan pengembangan persaingan yang sehat, serta belum memiliki arah jangka panjang. Indonesia bahkan dinilai belum merencanakan *positioning* yang jelas dalam kancan perdagangan global. Pada tabel secara ringkas ditampilkan perkembangan kebijakan perdagangan di Indonesia.

Pada bagian akhir Bab VI, tim penulis berupaya merumuskan strategi perdagangan terkait dengan perkembangan kebijakan yang dibagi dalam strategi kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang.

1. Perbaiki iklim investasi, melalui: pengurangan praktek ekonomi biaya tinggi, penerapan tata kelola pemerintah dan korporasi, menjaga kelangsungan kualitas dan daya saing produk unggulan, reformasi kebijakan pajak, perbaikan infrastruktur, dan meningkatkan koordinasi kebijakan antardepartemen.
2. Peningkatan daya saing produk barang dan jasa, melalui: pemetaan permasalahan yang dihadapi, pemetaan produk potensial, pemetaan posisi Indonesia, peningkatan dukungan, *capacity building*, dan penerapan *Indonesia incorporated*.
3. Pembentukan bidang hukum, melalui: pembenahan infrastruktur hukum, *capacity building*, dan penegakan kredibilitas penegak hukum.

Sedangkan secara eksternal, langkah yang dapat dilakukan: (1) Memperluas akses pasar, melalui: penyusunan strategi akses pasar tergantung segmen pasar, dan penyusunan strategi pengembangan perdagangan multilateral, regional, dan bilateral; (2) Pengoptimalan negosiasi perundingan kerja sama perdagangan internasional.(AN)

Perkembangan Kebijakan Perdagangan Indonesia

Periode	Kebijakan
1948 - 1966	Ekonomi Nasionalis yang mengorientasikan perdagangan
1967-1973	Sedikit liberalisasi dengan pola substitusi impor
1974 - 1981	Liberalisasi perdagangan dan orientasi ekspor kompetitif.
1986 - Sekarang	Liberalisasi perdagangan dan orientasi ekspor kompetitif.

Bab VI dan VII secara gamblang menceritakan kebijakan perdagangan Indonesia yang dibagi dalam dua fase besar, yakni sebelum krisis dan setelah krisis 1997. Secara umum, disimpulkan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kebijakan penguasa pada masanya. Banyak dari kebijakan Indonesia yang dinilai lebih bersifat reaktif dan parsial dan belum menyentuh pada persoalan struktural, seperti: meningkatkan daya saing, pengem-

upaya-upaya perbaikan iklim investasi. Dalam jangka panjang Indonesia hendaknya melakukan persiapan peningkatan perangkat lunak (pengetahuan dan keahlian), termasuk kelembagaan dibidang perdagangan dan kemampuan negosiasi.

Terkait dengan strategi tersebut, pada Bab VII, Rahmat dan Susanti selaku analis ekonomi madya di Direktorat Internasional, Bank Indonesia berupaya merumuskan langkah-langkah konkrit, yakni:

## **GALERI KAWASAN**



Sumber : Nunukan Zoner's Community



Dalam upaya mengejar ketertinggalan, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mulai tahun 1995 Provinsi Kalimantan Timur menjadi anggota Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA. Walaupun manfaatnya belum banyak menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat, namun keikutsertaannya dalam BIMP-EAGA tetap memberikan dampak positif. Salah satunya pembangunan prasarana dan sarana jalan di Pelabuhan Nunukan sesuai dengan kesepakatan program pada kluster perhubungan dan transportasi BIMP-EAGA.

Sumber : [www.merauke.go.id](http://www.merauke.go.id)

Provinsi Papua adalah provinsi yang berada di paling timur Indonesia. Provinsi yang sedang giat-giatnya membangun ini, memiliki potensi yang luar biasa dalam hal pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan juga pariwisata. Dengan potensi yang dimilikinya dan lokasi yang strategis karena berada di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini dan dekat dengan Australia, maka Provinsi Papua ikut tergabung dalam Forum Kerjasama Sub Regional BIMP-EAGA dan AIDA. Namun, kondisi infrastruktur yang masih terbatas, seperti jalan dan jembatan di Kabupaten Merauke di atas, menjadi kendala dalam memanfaatkan peluang kerjasama ekonomi secara optimal. Biaya yang mahal dan waktu dalam transportasi komoditas dagang, misalnya, dapat menimbulkan keengganan investor untuk berinvestasi di Provinsi Papua.

Sumber : berbagai sumber internet

Sulawesi kaya akan pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat ekonomi. Salah satu manfaat ekonomi dari kelapa yang saat ini banyak dikembangkan adalah Virgin Coconut Oil (VCO). Melalui forum KESR BIMP-EAGA, pengusaha VCO di Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan pengusaha di Malaysia dalam mengolah dan memasarkan produk VCO. Sayangnya, produk olahan VCO Sulawesi Utara masih menggunakan brand Malaysia untuk dipasarkan ke seluruh dunia.

## DAFTAR ISI

### Fokus

- Forum Kerjasama Sub Regional (KESR) dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Kawasan, Ditinjau dari Perspektif Kebijakan dan Implementasi — 1
- Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub Regional dalam Perspektif Mendorong Pengembangan Kawasan — 7

### Opini

- Perkembangan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) dan Peran Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam Membantu Perkembangan KESR — 13

### Daerah

- Dampak Penerapan KESR BIMP EAGA terhadap Pengembangan Ekonomi Kawasan di Provinsi Kalimantan Timur — 19

### Wawancara

- Peran Sekretaris Nasional KESR dalam Pengembangan KESR — 23

### Agenda

- *Small Workshop* dalam rangka Penyusunan Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2007 — 25
- Misi Supervisi PNPM (P2DTK) ke Provinsi Kalimantan Barat — 26

### Pustaka

- Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, oleh Tim Penulis Hubungan dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia — 27

Galeri Kawasan — 30

## DARI REDAKSI

Sebagai pintu gerbang antarnegara, wilayah perbatasan tidak hanya sarat akan kompleksitas masalah, namun juga menyimpan potensi akan kerja sama perdagangan regional. Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) adalah salah satu kebijakan yang berupaya menangkap peluang tersebut.

Peluang investasi dan perdagangan yang berorientasi pada permintaan pasar regional dan internasional ini harus segera ditindaklanjuti secara terpadu melalui penyiapan kawasan, infrastruktur, dan paket regulasi pendukung sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif Indonesia.

Lebih jauh lagi, adanya *interface* lokus perbatasan dari berbagai kebijakan, diantaranya: Kebijakan KESR, Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan, dan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET), serta yang paling terkini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), harusnya mampu menyadarkan semua *stakeholders* untuk mulai merajut mata rantai yang sinergi, sehingga meskipun membawa konsep dan tujuan 'antara' yang berbeda namun tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian *ultimate goal*, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat.

Benang merah 'kerjasama' antar kebijakan ini akan menjadi 'pekerjaan rumah' kita bersama sebagai pengembang kebijakan dan praktisi pembangunan agar tugas peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatif dapat secara ringan dipikul oleh banyak pihak dengan efisien dan hasil yang optimal.

Tantangan globalisasi semakin berat, meskipun begitu tidak bisa dihindari dan harus dihadapi. Pilihan kita hanyalah sigap dan mempersiapkan diri sebagai pemain yang tangguh atau acuh tak acuh dan tergilas menjadi korban penjajahan ekonomi kapitalisme. Lantas, mana yang kita pilih?

bulletin  
**Kawasan**

PELINDUNG : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas, Max H. Pohan; PENANGGUNG JAWAB DAN PEMIMPIN REDAKSI : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi; DEWAN REDAKSI : Rohmad Supriyadi, Samsul Widodo, Sutiman, Kuswiyanto, Hermani Wahab, Moris Nuaimi, Andri Narti RM, Diah Lenggogeni; REDAKTUR : Pringgadi Kridiarto, Rahmi Utamisari, Yelda Rugesty, Dharmawan Adiwiyanto, Supriyono, Yuliawati; KONTRIBUTOR REGULER : Amalia Falah Alam, Novera Puspaningtyas, Ika Dahlia Pusparini, Bagus Handoko, Sasli Rais; KESEKRETARIATAN DAN DISTRIBUSI : Dessy Sulasmini, Ratri, M. Fadholi, Okta.

ALAMAT REDAKSI Direktorat Kewilayahan II, Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310.

Telp. (021) 3926249, 3101984. Faks. (021) 3926249. Situs : <http://kawasan.bappenas.go.id>

Redaksi menerima tulisan dari pembaca. Untuk tulisan, panjang tulisan maksimal 5 halaman pada kertas ukuran A-4.

Redaksi berhak mengubah maupun mengedit tulisan.